



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	18
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Kepala Badan Restorasi Gambut; dan3. Lain-lain.
Hari, Tanggal	:	Selasa, 3 Desember 2019
Pukul	:	10.45 s.d. 15.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Ketua Rapat	:	SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Restorasi Gambut Tahun 2019;2. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020;3. Budi Daya Lahan Gambut oleh Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan; dan4. Lain-lain.

Anggota DPRD yang : 25 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
Hadir

F-PDIP

1. SUDIN, S.E. (KETUA)
2. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.
3. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.

F-PG

Ijin Fraksi

F-GERINDRA

1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
(WAKIL KETUA)
2. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO,
M.M.
3. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI
THOHARI, DESS., M.Sc.

F-NASDEM

1. Hj. SRI WULAN, S.E.

F-PKB

Ijin Fraksi

F-PD

1. Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
2. BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.

F-PKS

1. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
2. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

F-PAN

Ijin Fraksi

F-PPP

1. K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL
AFFANDY, S.Sy.

Undangan : 1. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
(Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur
Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

3. Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
9. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10:45 WIB)

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang terhormat Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Dirjen Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran.

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut beserta jajarannya.

Yang terhormat Kepala Dinas Pelaksana Dana Tugas dan Pembantuan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 18 Oktober 2019 dan Keputusan Rapat Internal pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada hari ini Selasa, 3 Desember 2019, Komisi IV

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup, Dirjen Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut.

Dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Restorasi Gambut Tahun 2019, rencana kerja dan program kegiatan Tahun Anggaran 2020, budidaya lahan gambut oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan lain-lain.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, saat ini RDP telah dihadiri dan ditandatangani oleh 15 anggota dari 6 fraksi. Berarti ini belum kuorum, saya tetap buka. Kemudian kita skors 5 menit, nanti dilanjutkan kembali.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rapat Dengar Pendapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 10.45 dan akan diakhiri pada pukul 14.45 apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. pengantar Ketua Rapat;
2. penjelasan para Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut terhadap agenda rapat;
3. tanggapan anggota Komisi IV;
4. jawaban Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut;
5. kesimpulan rapat;
6. penutup.

Apakah acara yang dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang berbahagia.

Keberadaan lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global. Lahan gambut di samping memiliki fungsi ekologis dan juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial budaya, fungsi ekologi dapat diperankan lahan gambut di antara menjaga keanekaragaman hayati, penyimpan karbon, penghasil oksigen, dan

pengelolaan air. Sedangkan fungsi ekonomi dan sosial budaya dari lahan gambut di antara lain; sebagai penghasil kayu dan sumber penghidupan masyarakat, ekowisata, serta tempat pendidikan dan penelitian, bahkan bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian.

Lahan gambut mempunyai potensi besar sebagai penghasil sumber pangan dunia karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan gambut yaitu seluas 21 juta hektar atau 36% dari luas lahan gambut tropis dunia. Sebagai ekosistem yang penting, lahan gambut di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 71 Tahun 2014 dan PP Nomor 57 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kondisi lahan gambut Indonesia yang semakin berkurang kuantitasnya maupun kualitasnya memerlukan perlindungan dan perhatian Pemerintah dengan adanya pemerataan Pemerintah. Selain Pemerintah serta masyarakat terhadap pelestarian lahan gambut juga diperlukan. Masyarakat sebagai faktor merupakan faktor utama dalam terjaganya kelestarian lahan gambut. Di tahun 2015 Indonesia mengalami kebakaran yang cukup hebat yang menghanguskan lebih dari 50% lahan gambut. Sejak itu Indonesia menggandakan upaya perlindungan dan restorasi ekosistem gambut yang merupakan ekosistem paling kaya karbon di dunia dan paling banyak dicari untuk perluasan lahan pertanian.

Perubahan cara pengelolaan lahan gambut di Indonesia sangat lah penting dalam mewujudkan komitmen nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencegah dampak buruk yang lain dari kebakaran seperti penutupan sekolah, gangguan pernapasan, kematian dini, dan lain-lainnya. Penyelenggaraan upaya pemulihan ekosistem gambut yang rusak menjadi tanggung jawab Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dalam menyelenggarakan upaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Badan Restorasi Gambut mempunyai tugas memfasilitasi, mengkoordinasi, restorasi ekosistem gambut seluas 2 juta hektar.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Permasalahannya, dana yang diperuntukkan untuk Badan Restorasi Gambut sangat minim sekali. Maka saya berharap nanti di tahun 2020 ada peningkatan untuk anggarannya tersebut.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen KLHK serta Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Waktunya kami persilakan siapa yang terlebih dulu.

Silakan Pak.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.
Pak Dirjen, Pak Kepala BRG yang saya muliakan.**

Pertama izinkan kami atas nama Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian BRG menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan untuk melaksanakan RDP pada hari ini. Selanjutnya izinkan kami dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan norma standar pedoman dan kriteria.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Dirjen

Kalau bisa nanti di jelaskan fungsinya Anda. Karena mohon maaf, di sini kan rekanan saya ini yang anggota lama cuma satu, mantan Dirjen itu sama Pak Asep. Yang lain anggota baru semua. Jadi tolong dijelaskan secara singkat tapi jelas.

Terima kasih.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Baik, memenuhi arahan Pimpinan. Izinkan kami menyampaikan

Direktorat kami adalah Direktorat Jenderal PPKL Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, merupakan 1 dari 9 Direktorat Jenderal yang ada di KLHK. Dan di tempat kami ada Direktorat Pengendalian Pemulihan Lahan Gambut. Jadi berfungsi, bertugas untuk memulihkan lahan gambut yang selama ini rusak akibat berbagai kegiatan. Oleh karena itu dari 6 Direktorat 1 khusus menangani gambut yang bermitra dengan Badan Restorasi Gambut. Jadi tugas kami adalah menyiapkan norma, standar, pedoman, kriteria, untuk mitra lain itu melaksanakan baik pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan di ekosistem gambut.

Dalam tayangan Bapak/Ibu yang terhormat kami menyampaikan sebenarnya kalau kita bicara gambut sejak tahun '90 melalui Keputusan Presiden Nomor 32 waktu itu sudah jelas disebutkan bahwa gambut dengan kedalaman di atas 3 meter itu wajib menjadi daerah atau Kawasan yang dilindungi. Kemudian masuk lagi di dalam Undang-undang Tata Ruang 27 kemudian Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ada. Tetapi saat itu yang diatur adalah lebih banyak pada zonasi, pemanfaatan. Tapi tidak sama sekali atau belum ada yang khusus mengatur bagaimana karakteristik dari ekosistem gambut itu.

Oleh karena itu Pak Pimpinan menyampaikan 2015 mengalami musibah luar biasa, kebakaran hutan gambut. Maka kemudian muncul lah Peraturan Pemerintah Nomor 71 2014 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Tetapi sambil berjalan muncul lagi diskusi kemudian tahun 2016 direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016. Oleh karena itu Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat. Izinkan kami menyampaikan untuk melaksanakannya kita sepakat bahwa ekosistem ini harus kita kelola, kita lindungi, berdasarkan pendekatan ekosistem melalui unit terkecil yaitu namanya Kesatuan Hidrologi Gambut. Bagaimana caranya memetakan? Maka keluarlah kemudian Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 cara menginventarisasi, kemudian menentukan mana yang lindung mana yang budidaya.

Kemudian bagaimana menjaga agar ekosistem gambut ini tetap terjaga? maka kita sepakati kadar airnya, tinggi muka air itu harus di bawah 0,4 meter. Maka keluarlah lah Peraturan Nomor 15 Tahun 2017 untuk menentukan kira-kira bagaimana cara mengatur tinggi muka air tadi sehingga bisa memenuhi 0,4 meter dan tetap bisa terpantau. Kemudian untuk pemulihan bagaimana caranya? Apakah harus diberikan secara tata airnya? vegetasi atau yang lain? maka keluarlah P.16 2017. Nah kemudian dalam perjalanan kita juga ternyata menemukan di lapangan itu banyak sekali kubah- kubah gambut yang sebenarnya berfungsi sebagai tandon air sudah rusak. Maka kemudian muncullah P.10 Tahun 2019 yang mengatur bagaimana menentukan menetapkan puncak kubah gambut.

Nah ini semua yang tadi kami sampaikan, Kesatuan Hidrologi Gambut di Indonesia itu diatur melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2017 yang akhirnya menetapkan ada 865 KHG Kesatuan Hidrologi Gambut Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Kemudian mana yang lindung mana yang budidaya diatur melalui SK Menteri LHK Nomor 130 Tahun 2017.

Ini Bapak/Ibu Anggota dewan yang terhormat.

Yang hijau-hijau itu adalah kawasan ekosistem gambut yang terbagi ke dalam 865 Kesatuan Hidrologi Gambut tadi. Jadi ada di Sumatera, Kalimantan, sedikit di Sulawesi, dan ada sebagian besar juga di Papua, dan Papua Barat. Ini Bapak/Ibu kira-kira kalau kita bagi per provinsi. Di Aceh itu ada 37 juta KHG dengan luasan yang lindung 178 ribu, yang budidaya 155 ribu yang sampai ke Papua Barat totalnya kembali saya laporkan totalnya 865 KHG dengan luasan

yang lindung itu 12.308.042 hektar, kemudian budidaya 12.265.340 hektar sehingga totalnya adalah 24.667.804 hektar.

Dari 865 KHG tadi, Bapak/Ibu yang sebagai dasar rujukan untuk melakukan pemulihan sampai saat ini baru berhasil kami memetakan 71 KHG skala 1 banding 50.000. Karena dalam aturan main disebutkan untuk operasional harus menggunakan peta 1 banding 50.000. Dari 71 KHG itu baru 21 KHG bisa, Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu anggota dewan. Karena apa? yang paling lengkap, sementara yang 50 masih ada lubang-lubang karena ada areal konsesi yang belum selesai untuk di petakan.

Di tahun 2020 sampai 2024 itu kami akan kembali memetakan untuk skala 1 banding 50.000, Cuma di luar nanti yang akan dilaporkan Bapak Kepala BRG. Nah sampai 2019 itu 7 provinsi sudah ter petakan. Sementara di tahun 2020 ini ada 12 provinsi, karena provinsi yang memiliki karena provinsi yang memiliki (suara tidak jelas), ada 19 provinsi di 178 kabupaten/kota

Nah tadi Pak Pimpinan menyampaikan bagaimana untuk masyarakat? Jadi di area masyarakat KLHK juga suda melakukan upaya pemulihan pada area seluas kurang lebih 9.890 hektar meter di KLHK, kemudian nanti di BRG akan dilaporkan, karena sejak ditetapkannya di Inpres No. 1 tahun 2016 tentang BRG sudah ditetapkan bahwa untuk pemulihan di 7 provinsi, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan Papua itu menjadi tanggung jawab Badan Restorasi Gambut. Kami sisanya di luar 7 provinsi itu, begitu. Jadi yang kami laporkan ini adalah yang di luar 7 provinsi yang dilakukan oleh BRG.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Oh jadi ini ada semacam pemisahan tugas dan tanggung jawab?

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Betul Pak Pimpinan.

Di dalam Perpres disebutkan 7 provinsi itu di BRG sementara 19 provinsi memiliki sistem gambut. Lanjut.

Harapan kami sampai tahun 2024 itu di area masyarakat kita akan pulihkan seluas 3.500 hektar. Di luar yang masyarakat, Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota dewan yang terhormat. Kami laporkan juga, kami juga mengarahkan semua perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut. Hutan, taruh lah itu ada 68 perusahaan, kemudian perkebunan sawit itu 173 perusahaan yang telah memiliki dokumen pemulihan ekosistem gambut. Kita wajib untuk memulihkan yang lindung harus dipulihkan, yang budidaya boleh mereka tidak melaksanakan dengan ketentuan tetap menjaga tinggi muka air yaitu 0,4 meter.

Jadi kalau kami boleh melaporkan pada forum yang terhormat ini, dengan membuat sekat kanal pembasahan tadi, maka luas areal yang sudah terbasahi itu sudah mencapai 3,26 juta hektar di areal konsesi. Terbasahi, belum ter pulihkan, baru terbasahi. Nah itu bisa kita buktikan melalui titik penataan tinggi muka air tanah yang kita bangun sebanyak 10.033 unit kemudian kita bandingkan juga dengan data curah hujan. Sekat kanal terbangun sebanyak 20.814 unit, kemudian rehabilitasi untuk vegetasi itu ada seluas 4.438 hektar dan yang suksesi alami itu 306.112 hektar.

Kami laporkan pada forum ini, untuk HT itu jumlah sekitar 96 perusahaan, yang sudah punya dokumen pemulihan 68, kemudian perkebunan berdasarkan data yang kami himpun dari semua daerah termasuk juga KPK itu ada 500 perusahaan tetapi yang baru punya dokumen pemulihan itu 173 perusahaan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saudara Dirjen, yang ingin saya tanyakan lebih jauh, yang mengauditnya siap? Tadi sudah lahan-lahan yang di HTI maupun di perkebunan? yang mengauditnya siap?

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Jadi yang kami lakukan sekarang ini baru sampai pada penetapan dokumen pemulihannya. Kemudian mereka wajib melaporkan berdasarkan data *logger*, *logger* nya yang *real time* otomatis. Kemudian data yang manual. Yang *logger* ini baru terbatas Pak Pimpinan, Bapak/Ibu anggota yang terhormat. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan FAO dibantu oleh citra satelit. Jadi ketahuan mana yang basah, yang kering, betul tidak yang dilakukan oleh perusahaan itu di lapangan itu berdasarkan datanya juga, sama jadi kami punya data 2.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Karena kan hampir sebagian besar lahan HTI ini yang terbakar. Nanti saya juga minta laporkan itu kan luas pemulihan 2 juta sekian. Dari 2 juta sekian, HTI 1 juta sekian, perkebunan. Saya juga minta datanya perihal di kawasan ini yang sudah pemulihan ada enggak yang terbakar? kalau ada yang terbakar tolong nanti saya dikasih datanya, siapa. Karena kita memikirkan bukan mencari kesalahan yang sudah terjadi tetapi akan datang pencegahannya bagaimana. Demikian.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Iya Pimpinan, siap Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Kami laporkan dari hasil pantauan kami bersama Direktorat Jenderal yang lain termasuk BRG, perusahaan-perusahaan yang sudah diintervensi Bapak Pimpinan, boleh dikatakan 90% aman dan kebakaran. Ada memang masih beberapa dan umumnya terjadi di perbatasan antara konsesi dengan masyarakat. Nanti datanya akan kami lengkapi.

Nah ini yang dimaksud Pimpinan yang tadi kami laporkan. Sampai 2011 ini ada luasan 9.890 hektar tetapi lagi kami laporkan itu yang di luar provinsi. Ada sebenarnya yang di Pak Nasir waktu awal-awal kita masih, ada juga di Riau dan Kalbar begitu ya. Nah ini titik pemantauan, Bapak/Ibu yang terhormat. Cara kami memantau apakah betul mereka telah melakukan upaya untuk pemulihan. Nah kemudian dari areal yang ada datanya adalah 60% itu (suara tidak jelas) berada pada kawasan hutan, sisanya di area penggunaan lain.

Kemudian dalam aturan main juga disebutkan untuk fungsi lindung itu bisa dilakukan kegiatan tapi terbatas hanya bentuk penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan atau jasa lingkungan. Sementara untuk di fungsi budidaya itu semua kegiatan bisa dilakukan sepanjang tinggi muka air tanahnya biar bisa dijaga pada ketinggian maksimal 0,4 meter. Ini kira-kira arahan kami untuk nanti Pak Dirjen PPKL bisa melakukan pemanfaatan untuk peran sosial. Jadi konsepnya tentu masyarakatnya harus dipetakan, lokasinya per masing-masing ekosistem gambut juga berbeda karakteristiknya. Kemudian perlu desain untuk pemulihan ke depan.

Ini jadi yang terjadi selama ini bisa kita lakukan melalui cara restorasi. Yaitu tata hidrologi, tata air kita atur. Melalui sekat kanal, penemuan kanal, pemompaan, dan juga sumur bor tetapi juga bisa dalam bentuk vegetasi. Ini revegetasi digunakan jenis-jenis lokal. Bisa juga melalui (suara tidak jelas) kultur, *agroforestry*. Kemudian kita berharap terjadi kemandirian masyarakat bisa contoh pertanian, perikanan, peternakan, hasil hutan non kayu. Di samping juga tadi kami siapkan dari awal kelembagaannya. Jadi untuk yang kami lakukan selama ini kami bekerja sama dengan universitas setempat untuk tadi, menjadi pengawal masyarakat di lokasi. Caranya harus ada insentif yang mereka peroleh itu.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Dirjen, sebentar mumpung saya ingat.

Sekat kanal itu dibangun di wilayah konsesi HTI di perkebunan atau di luar wilayah?

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Dua-duanya Pak Pimpinan. Jadi kita harus dari awal sepakat harus menggunakan Kesatuan Ekosistem Gambut, jadi satu ekosistem. Jadi kalau yang perusahaan maka wajib mereka yang melakukan, yang masyarakat Pemerintah yang membantu. Yang di luar masyarakat yang terbentuk berbentuk badan hukum juga begitu, itu kami yang bantu.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tapi di dalam lokasi atau di luar lokasi HTI tadi yang saya tanyakan.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Yang masyarakat sebagian ada yang di dalam konsesi. Ada juga yang masyarakat tapi itu kewajiban konsesi karena areal mereka. Tapi di luar itu, Pemerintah.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya berharap begini, jadi jangan kalau terjadi kebakaran, masyarakat lah yang salah, pengusaha yang benar. Ya mohon maaf, karena pengusaha dianggap punya uang, bisa berbuat seenaknya. Dan saya sangat tahu sekali. Jadi seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat sebuah terobosan semacam garis sepadan. 200 meter atau 300 meter atau berapa ratus meter dari batas lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah itu menjadi tanggung jawab pengusaha ini.

Saya sudah bilang dari zaman pak Zulkifli Hasan saya sudah bilang, harus pakai sepadannya, tanggung jawabnya. Jangan nanti "Oh itu bukan saya itu rakyat miskin itu yang membakar hutan karena begini". Jadi usul saya selaku Pimpinan Komisi IV, tolong dibuat sepadan. Sepadan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Ya Pak ya?

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Siap Pak Pimpinan.

Kami laporkan berdasarkan peraturan yang ada di LHK itu radius 5 Km di luar zonasi, tanggung jawab perusahaan, Pimpinan. Ini gambaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah tadi bagian dari pengembangan selanjutnya jadi zonasi juga menentukan sekali karena masing-masing wilayah berbeda karakteristiknya. Lanjut, desainnya akhirnya muncul karena menyesuaikan.

Nah ini kira-kira kalau kita rangkum jadi kalau kita lihat di masyarakat umumnya di halaman rumah mereka menggunakan sebagai areal untuk menanam sayur dan buah juga ladang. Kemudian ke luar sedikit itu ada agro produksi, peternakan, produk non kayu. Nanti di PSKL mungkin juga produk kayu Pak Dirjen? kemudian ada kolam ikan dan yang fungsi lindung.

Ini komoditas yang sudah dilakukan bisa berbentuk lidah buaya, kelapa, kayu gelam, buah naga, mungkin (suara tidak jelas) menyampaikan banyak area yang sudah dikembangkan masyarakat. Nanas juga bagus kali hasilnya, rumput purun di Kalsel, Kalteng. Ini yang pola perikanan di rawa juga, perikanan di Kalteng dari dulu sudah banyak yang budidaya perikanan dilakukan. Ini juga ada kita siapkan sebenarnya di dalam Permen 16, jenis-jenis apa saja tumbuhan yang bisa ditanam, sudah lengkap semuanya. Ini juga ada umumnya tanaman lokal.

Kami laporkan Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu yang terhormat dari unit yang ada tempat kami, Direktorat Pemulihan Ekosistem Gambut itu tahun 2019 kemarin ada dana 12 miliar APBN, Kemudian dari bank luar negeri, dari IFAD itu FAO sampai sekarang sudah ada. Yang APBN 67% kemudian yang IFAD ini baru 32% karena baru kontraknya itu keluar bulan Oktober sekarang lagi proses jadi pembayaran mungkin nanti akhir Desember.

Jadi realisasi Kami sampai hari ini Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu yang terhormat itu 72,7% untuk yang gambut. Untuk 2022 Bapak Pimpinan, kami untuk gambut juga hanya mendapat dana 19 miliar. Bentuknya itu pemulihan kemudian pemantauan

(rekaman terpotong) meningkatkan desa dari gambut untuk pemetaan. Jadi sekali lagi kami laporkan 865 KHG sampai 2004 mungkin baru 50% bisa kita selesaikan pembuatan 1 banding 50.000 ini.

Itu Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat yang dapat kami sampaikan. Mungkin pemanfaatan bagi masyarakat, Pak Dirjen kemudian yang 7 provinsi lebih *detail* akan disampaikan oleh Kepala BRG.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ya, Pak Dirjen dilanjutkan.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.

Anggota Komisi IV, Pak Dirjen PPKL, Kepala BRG, dan Kepala Dinas 7 Provinsi.

Kami menghanturkan banyak terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Dalam bahan RDP ini akan disajikan mengenai peta indikatif areal perhutanan sosial, kemudian capaian perhutanan sosial, dan progres usulan pada wilayah gambut, kebijakan perhutanan sosial di wilayah gambut, dan upaya percepatan implementasi perhutanan sosial pada wilayah gambut.

Namun demikian Sebelum saya meneruskan Saya ingin menyampaikan mengenai tugas pokok dan fungsi dan juga mengenai pengertian perhutanan sosial. Tugas Dirjen PSKL itu adalah mendistribusikan akses legal kepada masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat untuk mengelola *landscape* kawasan hutan. Kemudian setelah dilakukan pendistribusian itu dilakukan pendampingan agar tata kelola hutannya dan tata kelola usahanya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bentuknya perhutanan sosial itu ada 5 yang pertama adalah hutan desa. Jadi yang mengelola adalah lembaga pengelola hutan desa, kemudian yang kedua adalah HKM (Hutan Kemasyarakatan), yang ketiga adalah HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dan yang keempat ini kemitraan. Bisa kemitraan antara perusahaan dengan rakyat kemudian KPH dengan rakyat, Perhutani dengan rakyat dan yang kelima itu adalah mengenai pengakuan untuk hukum hutan adat, Bapak Pimpinan. Jadi 4 struktur perhutanan sosial dalam bentuk izin, sedangkan hutan adat dalam bentuk hak kelola kepada masyarakat.

Izin melanjutkan, ini mengenai PIAPS. Bahwa program perhutanan sosial merupakan program atau pelaksanaan program reforma agraria di samping TORA ada yang kedua adalah mengenai perhutanan sosial. Kalau TORA adalah mengenai legalisasi aset, kampung-kampung yang ada di dalam kawasan hutan itu dikeluarkan. Sedangkan perhutanan sosial itu adalah bagaimana negara memberikan, mendistribusikan legal kepada masyarakat dalam kelompok masyarakat.

Di dalam RPJMN tahun 2015-2019 targetnya adalah 12,7 juta hektar. Nah pada saat ini LHK telah mengalokasikan 13,625 juta hektar melalui revisi 4 Keputusan Menteri mengenai peta indikatif areal perhutanan sosial yang diterbitkan setiap 6 bulan. Yang terakhir kali adalah tanggal pada bulan Juli tahun 2019 Jadi secara target itu 12,7 sudah dialokasikan 13,625 juta hektar. Yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana mendistribusikan karena harus ada kesesuaian mengenai subjek dan objek nya dari 13,6 juta hektar itu ternyata 2,345 juta hektar berada di gambut, kawasan hutan gambut. Dan yang berstatus HP itu adalah hutan produksi adalah 2,3 juta hektar, sedangkan HL nya itu adalah sekitar 31 ribu hektar.

Berikutnya, pada saat ini pencapaian sampai tanggal 21 Oktober 2019 itu adalah di 3,436 juta hektar dengan perincian di hutan Desa 1,435 juta hektar, HKM 697 ribu hektar, HTR 347 ribu hektar, kemudian untuk kemitraan itu adalah 351 ribu hektar, kemudian IPHPS ini khusus untuk yang di Jawa itu adalah 26 ribu hektar, dan hutan adat ini sudah hampir 600 ribu hektar untuk pengakuan dan juga untuk cadangan. Pencadangan untuk hutan adat.

Sedangkan untuk di gambut izin yang sudah terbit itu ada di 117 lokasi dengan total luas itu adalah 225 ribu hektar kurang lebihnya. Berikut ini adalah, karena adanya PP 57 Tahun 2016 yang merupakan revisi daripada PP 71 maka usulan-usulan yang setelah Desember 2019 itu menunggu NSPK yang tadi disampaikan oleh Dirjen PPKL, Pak Ketua. Jadi oleh karena itu ini baru bisa diproses setelah PP Nomor 10 Tahun 2018 yang terbit. Oleh karena itu kita bisa laporkan bahwa dari usulan yang baru 122 lokasi seluas 259 ribu hektar itu yang sudah memasuki tahap untuk menerbitkan SK itu adalah 62 ribu hektar sedangkan sisanya masih dalam proses untuk verifikasi teknis di tingkat rapat. Dan juga ada perbaikan-perbaikan di dalam konteks untuk subjek dan objek nya.

Nah ini Bapak dan Ibu setelah terbitnya Permen P.10 berikutnya ini kita terbitkan aturan khusus untuk bagaimana perhutanan sosial pada ekosistem gambut yang *me-refer* kepada NSPK yang telah diterbitkan dari Dirjen PPKL mengenai aturan-aturan yang pada hakikatnya bahwa pemanfaatan hutan di ekosistem gambut itu harus mengikuti KHG kemudian pemanfaatannya utamanya bukan kayu walaupun kayu hanya untuk pemanfaatan dirinya sendiri atau kepentingan sendiri, kemudian pendampingan, kemudian buka lahan tanpa bakar, kemudian tekniknya adalah teknik mengenai paludikultur. Bagaimana yang sesuai dengan ekosistem gambut.

Berikut ini barangkali perhutanan sosial pada ekosistem gambut yang diatur dalam Permen 37 ini yang sudah diundangkan melalui lembaran-lembaran negara pada tanggal 29 Oktober tahun 2019 ini baru satu bulan. Yaitu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kelestarian ekosistem gambut dan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem gambut Kemudian ada hanya 4 skema yang diperkenalkan di dalam konteks perhutanan sosial yaitu hutan Desa, HKM, kemitraan Kehutanan, dan hutan adat. Kemudian pemanfaatan pada ekosistem gambut ada fungsi budidaya pada hutan produksi itu adalah mengenai pemanfaatan kawasan, kemudian pemanfaatan jasa lingkungan, kemudian pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kemudian untuk fungsi lindung pada hutan produksi dan hutan lindung itu ada 4 pemanfaatannya. Yang pertama adalah kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan tanaman kehidupan untuk kebutuhan pangan dengan varietas yang adaptif, kemudian pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dan itu dilaksanakan sesuai dengan fungsi ekosistem gambut dan dengan

tetap menjaga fungsi hidrologis gambutnya. Nah ini juga bisa dilakukan dengan kegiatan *agroforestry* tetapi dengan teknik paludikultur atau budidaya tanaman tanpa drainase. Kemudian sesuai dengan lahan gambut yang basah dan telah dilakukan pembahasan dengan memilih spesies rawa asli gambut.

Berikutnya ini adalah perinciannya mengenai pemanfaatan kawasan untuk fungsi kawasan budidaya dan fungsi lindung dengan pola *agroforestry* bisa untuk tanaman obat, kemudian tanaman hias, jamur, lebah, kemudian penghijauan makanan ternak, sarang burung walet, kemudian juga untuk ikan dalam bentuk beje kolam, keramba, dan juga pemanfaatan sekat kanal. Sedangkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi budidaya bisa untuk pemanfaatan jasa air, pemanfaatan air, kemudian pen jagaan dan pemeliharaan ketersediaan air di lahan ekosistem gambut, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan, dan juga penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Sedangkan untuk di fungsi lindung yaitu adalah untuk kegiatan wisata terbatas, perdagangan karbon, penelitian dan pendidikan, dan kegiatan ilmu pengetahuan. Sedangkan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan fungsi budidaya dan lindung itu satu, untuk rotan, sagu, nipah dan bambu. Kemudian yang kedua adalah untuk getah, kulit-kulit kayu, daun dan buah atau biji termasuk di dalamnya adalah gaharu. Kemudian untuk pemanfaatan tanaman kehidupan untuk kehidupan pangan dengan varietas yang adaptif itu tanaman yang berkayu yang adaptif, kemudian tanaman budidaya tahunan yang berkayu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen PPKL, kemudian juga tanaman jenis lainnya untuk tanaman pangan.

Kemudian di dalam Permen LHK 37 ini ada larangan dalam pemanfaatan ekosistem gambut untuk perhutanan sosial. Yang pertama adalah membuka lahan baru dengan cara *land clearing* atau *clear cutting*, tebang habis, kemudian membuka kanal pada benang lahan ekosistem gambut, membuka saluran drainase yang mengakibatkan rambut menjadi kering, kemudian membakar lahan gambut dan /atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran dan /atau melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampaunya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

Berikutnya, nah ini Bapak dan ibu upaya percepatannya. Jadi kami punya program Pak namanya Kerja Bareng Jemput Bola karena Balai kami itu hanya 5 di seluruh Indonesia untuk PSKL. Di wilayah Sumatera itu di Medan untuk regional Sumatera, kemudian di Kalimantan itu di Banjarbaru, kemudian di Sulawesi itu di Makassar, Papua Maluku itu di Ambon. Jawa, Nusa Tenggara, Bali itu ada di Denpasar.

Oleh karena itu kita dengan Kerja Bareng Jemput Bola kita bekerja sama dengan Pak Gubernur bahwa di dalam setiap provinsi ada namanya Pokja PPS Percepatan Perhutanan Sosial. Jadi tiap yang ada di LHK ini di *overlay*-kan

dengan wilayah administrasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Kemudian di *overlay*-kan dengan izin-izin yang telah terbit, maka akan ada di desa-desa yang belum berizin. Dengan Kerja Bareng Jemput Bola maka itu akan ada *setting* prioritas untuk dijemput melalui *coaching clinic* di tingkat desa nya, itu upaya percepatannya. *Alhamdulillah* pada tahun 2018 dan 2019 itu tercapai 1,3 juta hektar per tahunnya untuk distribusi-distribusi legal akses kepada masyarakatnya. Kalau sebelumnya hanya 600 dan 300.

Kemudian yang kedua dengan para pihak kita melakukan bahwa di 6.112 lokasi perhutanan sosial itu dilakukan pendampingan. Ini Bapak Pimpinan, memang di anggaran kita pendampingannya baru 1.215 sementara lokasinya sudah 6.112 artinya 1 banding 4 atau 5. 1 pendamping harus mendampingi masyarakat di 5 lokasi. Keinginan kami barangkali ini akan lebih bagus kalau satu lokasi satu pendamping untuk tahun anggaran berikutnya kalau itu dimungkinkan. Karena adanya kekurangan ini maka kita bekerja sama Pak dengan BRI, ini sudah kita lakukan. Jadi lokasi-lokasi 112 lokasi yang di areal gambut tadi pendampingannya melalui salah satunya melalui BRG, kemudian melalui penyuluh-penyuluh di provinsi dan juga dengan teman-teman LSM di tingkat tapaknya.

Saya pikir demikian Pimpinan. Terima kasih. Mohon arahan lebih lanjut.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Dirjen, ada hal yang ingin saya tanyakan. Ini kan HKM di tempat Bapak kan? Iya kan? Itu HKM diterbitkan apakah ada *monitoring* atau enggak? karena setahu saya saat ini di Lampung agak acak-acakan juga masalah HKM itu. Karena mungkin, ya mungkin ini mohon maaf. Mungkin dulu HKM nya karena mau Pileg diumbar begitu saja. Enggak, kita mesti jelas, mesti *clear* ini. Ya mungkin kalau Saudara Dirjen jujur dalam hati akan berkata seperti itu juga.

Jadi HKM terlalu diumbar di semua tempat di Lampung. Tapi bingungnya cuman Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Sedangkan wilayah hutannya bukannya wilayah situ saja termasuk Lampung Utara, Way Kanan Lampung Timur, Way Kambas, termasuk Lampung Timur. Rasanya HKM ini minim sekali tetapi di 3 kabupaten ini wah besar sekali itu HKM nya.

Silakan Saudara Kepala Badan Restorasi Gambut

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kita muliakan bersama Ketua Komisi dan Pimpinan lainnya.
Bapak/Ibu Anggota dewan yang terhormat.
Rekan kami Bapak Dirjen dan juga perwakilan dari 7 provinsi Kepala
Dinas Anggota tim restorasi daerah atau yang mewakili.**

Kita mulai saja Bapak/Ibu. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas arahan, hubungan kerja sama yang baik selama ini dengan Komisi IV DPR RI untuk agenda yang memang sangat penting sekali untuk memperbaiki ekosistem gambut di Indonesia. Kita ialah negara tropis yang memiliki lahan gambut terluas. Menurut data dari Kementerian Pertanian dan LHK sekarang kita memiliki 14,9 juta hektar terbagi di 11 provinsi.

Gambut sendiri merupakan himpunan materi organik atau sisa-sisa pohon-pohon yang terkumpulkan dan tidak membusuk. Indonesia sangat keras karena kubah gambutnya berbentuk mangkok seperti itu memiliki kedalaman sampai puluhan meter. Biasanya negara lain memiliki juga tapi tidak sedalam yang ada di kita. Ini terjadi karena memang biomassa tumbuh-tumbuhan sangat tinggi sekali pertumbuhan di Indonesia sehingga gambut nya tebal, tertumpuk tiap tahun dan tidak membusuk karena berada di bawah rawa air yang ber Ph rendah atau keasaman tinggi.

Tentu ada permasalahan karena sebelumnya ada kebijakan membuka lahan gambut dengan pengeringan di tahun '80-'90 terutama sehingga kita menikmati kekurangannya sekarang dengan jutaan hektar lahan gambut yang kering dan mudah terbakar dan kalau sudah terbakar pemadaman yang sangat sulit. Kita ketahui bersama rekan pemadam kebakaran kehutanan hutan di Amerika Serikat yang kita ajak diskusi dan berkonsultasi, rekan senior ini orang Amerika, petugas LHK nya Amerika itu mengatakan kalau kebakaran gambut di Amerika pun mereka angkat tangan. Yang memadamkan nanti salju mencair di musim sem. Jadi itu, gambut terbakar di Amerika bisa dari musim panas, musim dingin sampai musim semi. 6 bulan lebih.

Bapak Presiden tahun 2016 melalui Perpres Nomor 1 membentuk Badan Restorasi Gambut dengan diberikan target 2 juta hektar dan bekerja di 7 provinsi. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dirjen yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan juga Papua. Ini provinsi yang memiliki gambut cukup luas dan juga ada yang sudah sangat parah sehingga perlu diperbaiki. Kalau kita lihat wewenang dari penanggungjawab kawasan, mohon maaf ini fungsi BRG memang banyak tapi kalau kita melihat penanggungjawab kawasan yang sudah terbagi menurut berbagai peraturan dan juga di Permen LHK. Kawasan konservasi di mana di situ ada gambut itu tentu berada di bawah wewenang UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau di UPT taman nasional ataupun UPT Daerah Taman Hutan Rakyat.

Kalau berada di hutan lindung itu di bawah dinas provinsi. Dinas Kehutanan Provinsi. Kalau di bawah hutan produksi yang belum berkonsensi

itu juga dibawa Dinas Kehutanan provinsi tapi yang kalau sudah ada konsesi izinnya tentu di bawah pemegang izin, tanggung jawabnya. Di kawasan non hutan atau areal penggunaan lain, kalau konsesi misalnya HGU perkebunan itu juga berada di bawah tanggung jawab pemegang izinnya. Kalau belum diberikan Konvensi atau berupa lahan masyarakat itu di bawah wewenang Pemerintah Daerah. Hal ini terutama kabupaten/kota dan tentu masyarakatnya. Dan fungsi BRG ini harus melakukan koordinasi dan memfasilitasi para pemegang wewenang dari berbagai kategori lahan gambut. Apakah di konservasi lindung, hutan produksi atau area penggunaan lain.

Selanjutnya kami ingin memasuki sekarang tentang target 2 juta hektar yang diberikan Bapak Presiden melalui selangkah diskusi ilmiah dengan para pakar dan juga tentu dari rekan berbagai Kementerian dan Lembaga. Itu kita setuju beberapa kriteria untuk memilih lahan 2 juta hektar tadi dari 14,9 yang ada di Indonesia. Dan dari kriteria yang kita gunakan kita taruh di peta dan keluarlah angka bahkan 2,67 juta hektar yang harus di restorasi. Itu terbagi di area konservasi seluas 491 ribu hektar. Di area konsesi yang telah ada izinnya itu ada 1,78 juta hektar, dan di area budaya yang tidak berizin ini ada 400 ribu hektar.

Kalau yang pertama area konservasi tentu berada di bawah wewenang Kementerian LHK atau terutama Direktur Jenderal KSDAE atau Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya. Yang kategori kedua yang 1,7 juta hektar itu, itu ada di bawah konsesi. Tentu pemegang konsesi sesuai dengan Perpres kita diberikan tugas untuk membantu menyupervisi tentu bersama Kementerian teknis terkait. Yang ketiga area tidak berizin, di bawah Pemerintah Daerah dan kita bersama Pemerintah Daerah membuat bermacam program untuk merestorasi lahan masyarakat seluas 400 ribu hektar ini.

Selanjutnya kalau ini kita lihat peta, mungkin bisa dengan cepat saja yang berwarna-warna itu semuanya daerah gambut dengan berbagai area hijau itu kawasan konservasi atau hutan lindung dan seterusnya. Ini tersebar cukup luas ada di Kalimantan Tengah dan ini di Papua. Bapak/Ibu bisa lihat banyak sekali ternyata sebetulnya jumlah kawasan gambut di Papua walaupun sebagai besar hijau itu masih dalam keadaan cukup baik. Yang merah, yang terbuka sedikit sekali. Kalau kita bandingkan dengan di Kalimantan, di Riau barangkali terbalik. Yang di Riau banyak yang memang sudah terbuka.

Selanjutnya, apa yang telah kita kerjakan kalau kita mengacu ke PP No. 71 Tahun 2014 dan PP Nomor 57 2016, Bapak dan Ibu yang terhormat itu tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kegiatan pemulihan gambut ini dibagi tiga kategori. Ada pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan. Dan restorasi gambut itu merupakan salah satu dari berbagai kegiatan untuk mengelola, dan melindungi, memanfaatkan gambut. Yang tugas KLHK kami yang warna hijau, restorasi di sebelah kanan.

Selanjutnya, prakondisi restorasi itu tentu juga mengacu ke PP, ke Permen LHK itu perlu dibentuk rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Target kami ada 106 KHG. Tadi Bapak Dirjen sudah menjelaskan ada Kesatuan Hidrologi Gambut yang merupakan unit perencanaan dan juga unit untuk tata kelola ekosistem gambut dan juga perbaikan tata kelola air. 104 itu kita hitung dari luas 2,67 juta hektar yang merupakan target BRG. Tadi Pak Dirjen menjelaskan di Indonesia ada 800 lebih KHG, kami fokus di 106 KHG ini. Dan tentu pekerjaan pertama yang membuat peta menjadi dasar rencana pemulihan dan juga memfasilitasi berbagai pemegang wewenang di dalam lahan tersebut.

Selanjutnya, dalam merencanakan kerja tentu kita membuat rencana tahunan, rencana tindakan tahunan, kita sebut RTT yang tahun 2019 ini kita bikin RTT untuk pelaksanaan di 2020 dan itu berbasiskan tadi seperti kata Pak Dirjen juga. Kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut bersama KHG. Sehingga intervensinya bisa semaksimal mungkin karena merencanakan kegiatan restorasi di seluruh ekosistem gambut dalam satu bentang alam.

Selanjutnya, ada 3 prinsip kerja yang kita gunakan di dalam restorasi gambut dan ini juga ada di rencana kerja kita, dokumen rencana kerja 1, R1 kita sebut itu *rewetting* atau pembasahan ini berarti pembalikan tata kelola air itu membangun infrastruktur pembasahan. Apakah itu kanal-kanal yang disekat, kita ketahui kanal itu fungsinya mengeringkan yang berupa drainase. Ini akibat kebijakan zaman dulu, sekarang kita tutup kembali, kita atur tata airnya sehingga air hujan yang turun bisa tertampung optimum, tidak semuanya ke sungai dan ke laut.

Kita juga melakukan penimbunan. Jadi kanal-kanal ditimbun ulang. Ini tentu dilakukan di kawasan konservasi karena kalau ditimbun ulang pasti akan ada banjir selama musim hujan. Namun banjir musim hujan ini itu keluarkan itu sebetulnya tandon air. Kita menghadapi musim kemarau, semakin banyak simpan di daerah gambut, kubah-kubah gambut. Semakin panjang stamina kita untuk menghadapi musim kemarau. Dan khusus di daerah yang kering dan rusak bekas terbakar berkali-kali dibuka dan dibakar, atau terbakar tapi tidak ada sumber air di permukaan berupa kanal yang bisa disekap. Kita membangun sumur bor, mengambil air tanah dari kedalaman 20 sampai 50 meter.

Kalau area gambut yang kedalaman air tanahnya sampai 100 meter lebih kami tidak sanggup, karena umumnya kami mengajak masyarakat membuat sumur bor dengan teknologi sederhana yang bisa dilakukan, dipelajari oleh masyarakat setempat. R2 kami sebut re-vegetasi. Yaitu menanam ulang tapi perlu dicatat Ibu dan Bapak yang terhormat, upaya penanaman ini umumnya sangat besar biaya di banding R1 dan R3. Jadi kami lebih menitikberatkan pada sukseksi alam. Tetap perlu ada penanaman tapi itu luasannya yang terbatas. Kita berharap sukseksi alami bisa berjalan dari hutan-

hutan di pinggiran ataupun plot yang kita tanami setelah beberapa tahun dia bisa secara alami menyebar.

Yang ketiga melakukan kegiatan revitalisasi ekonomi, ini penting sekali karena umumnya dilaksanakan tersebut ada kegiatan ekonomi masyarakat. Dan merekalah yang dianggap lumayan marginal. Bapak presiden Ketika saya ditunjuk pada hari pertama mengingatkan kepada saya bahwa masyarakat gambut ini umumnya memang lebih miskin, lebih tidak sejahtera dibanding masyarakat yang ada di lahan tanah mineral apalagi tanah vulkanik.

Kita ketahui tanah vulkanik sangat subur. Tanah gambut umumnya tidak sesubur tanah-tanah mineral lainnya. Pengolahan lahan gambut juga lebih mahal dan mereka masyarakat yang perlu dibantu. Jadi negara perlu hadir di ekosistem yang paling marginal, masyarakat yang paling susah. Salah satunya di lahan gambut.

Kita melakukan berbagai kegiatan alternatif mata pencaharian. Kita bentuk skema yang kita sebut Desa Peduli Gambut. Ini tentu bersama Pemerintah Daerah, bersama Kementerian Desa, Mendagri, dan kita juga mengeluarkan kelembagaan desa di dalam rencana perencanaan jangka panjang desa di dalam membuat aturan-aturan lain, bagaimana kawasan gambut di desa tersebut bisa dimanfaatkan.

Mundur dulu Mas, tolong mundur lagi, mundur-mundur. Terlalu maju *slidenya*.

Ya kami sekarang mungkin akan minta waktu sedikit masuk satu-persatu Bapak. R1, R2, dan R3. Dan selanjutnya pada R1 ini contoh sumur bor, contoh sekat kanal, dan contoh penimbunan kanal seperti ini. Penimbunan kanal yang saya lihat langsung itu di, yang terhormat Bu Kiki di OKI. Itu ada kawasan suaka margasatwa yang pernah dibuka tahun 80-an untuk transmigrasi. Jadi dibuka dengan kanal lebar dan banyak sekali sebut lajur-lajur Bu ya, kalau di OKI. Dan itu akhirnya memang mengeringkan di kawasan ini di setiap musim kemarau. Air yang tertampung musim hujan itu lari ke sungai yang memang kanal dibuka untuk menghubungkan dua sungai. Karena gambutnya lebih tinggi serta gravitasi, air gambut semuanya tertarik ke sungai dan mengeringkan dan mudah terbakar.

Kita timbun kembali satu kanal panjang itu, bisa sampai 5 penimbunan. Kalau kita timbun dari kilometer 1 sampai kilometer 10 tentu biayanya mahal sekali. Jadi tertimbunnya kita hitung secara ilmiah, apakah cukup di ujung-ujung saja muara kanal di sungai, atau juga kalau dia terlalu panjang perlu timbun juga di tengah-tengah. Jadi ada yang kanalnya tidak terlalu panjang dan datar, cukup dua penimbunan ujung dan ujung. Kalau kanalnya panjang dan topografinya lebih bervariasi kita timbun sampai 5 tempat. Sekali penimbunan itu bisa lebarnya 50 meter atau bahkan lebih.

Rekan-rekan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam LHK bekerja sama dengan kita itu melaporkan tempat yang telah tertimbun memang sehingga bulan Agustus tahun ini pun masih banjir, banyak air. September mungkin sudah kurang karena kemarau panjang. Dan telah terjadi suksesi alami, pohon-pohon lahan ekosistem rawa mulai tumbuh. Tadinya pohon-pohon rawanya mati karena daerahnya dikeringkan, jadi mulai tumbuh, itu spesies yang tanah. Spesies atau lahan kering. Tapi karena ini ditimbun mulai dia basah, berubah rawa kembali, hilang spesies yang asing tersebut. Mulai tumbuh spesies aslinya.

Jadi ini merupakan memang penimbunan kanal, karena strategi yang paling tepat tapi akibatnya akan banjir. Jadi tidak bisa kami lakukan di lahan budidaya. Nah budidaya itu menggunakan sekat kanal yang di tengah. Ada yang danaunya di bangun sebelah kiri itu yang di Kalimantan Barat dengan beton sehingga kuat sekali. Tentu satuan unit lebih mahal. Yang lain yang sebelah kanan atau yang tengah itu Bapak-Ibu itu dibangun dengan kayu dan juga tanah. Ini jauh lebih murah harganya, bisa 1 banding 4 atau 1 banding 5 sekat kalo dibanding yang beton.

Yang dibangun kami juga upayakan sebanyak mungkin dibangun oleh masyarakat. Jadi masyarakat tempatan mendapatkan program pembangunan sekat kanal, mereka dilatih menjadi kontraktor, membangun sekat kanal secara teknologi pembangunan itu dibantu oleh asisten teknis memberdayakan LSM, mahasiswa, ataupun perguruan tinggi. Jadi kegiatan tahunannya sudah mendapatkan manfaat ekonomi langsung karena mereka yang membangun, mereka yang menjadi kontraktornya, mereka bukan buruh oleh kontraktor dari luar.

Yang paling atas pembangunan sumur bor ini terutama di lahan-lahan gambut yang kering tapi tidak ada sumber air berupa kanal yang bisa di sekat sehingga kita bangun sumur, ini juga masyarakat dilatih membaut sumur. Satu sumur kalau masyarakatnya sudah terlatih bisa selesai hanya dalam waktu 2-3 jam. Akhirnya ini juga berguna untuk pembasahan gambut di musim kemarau agar kebakaran risikonya bisa lebih minimal karena ada upaya pembasahan di lahan gambut yang kering yang tidak ada sumber air.

Selanjutnya, ini jumlah total hingga akhir 2018, mohon maaf agak kecil, kalau Bapak lihat di bawah itu sekat kanal yang terbangun 5.100 sumur bor ada 11.425 dan penimbunan kanal ada 143 titik. Ini diperkirakan membasahi 671 ribu hektar. Ini semuanya di kawasan APL lahan masyarakat tidak dikonsesi. Di tahun 2019 ini pekerjaan masih berlangsung, penyelesaian ada yang sudah 100% ada yang baru 60%. Kita perkirakan akan menambah 150 ribu hektar sehingga nanti akan mencapai 800 ribu hektar. Lebih sedikit upaya pembasahan dari tahun pertama hingga tahun keempat ini.

Selanjutnya dari kegiatan R3 atau di revitalisasi kita telah bekerja 162 desa. Kita sebut Desa Peduli Gambut, itu melibatkan tentu Pemerintah Daerah

dan perangkat desa, maupun masyarakat Pokmas, mahasiswa, LSM. Terbagi dari berbagai provinsi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Maaf, Pak Kepala BRG. Apakah nanti kita akan membahas R2 nya juga?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (NAZIR FOEAD):

R2 tadi hanya saya tunjukkan luasnya. Pak mungkin mohon maaf bisa dimundurkan 1 *slide*? R2 itu telah kita lakukan penanaman di 827 hektar.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

827 hektar? dari total penanamannya cuma 827 hektar?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Karena 1, dia mahal sekali Pak. Kalau kita tingkatkan itu nanti anggaran yang ke pembasahan jadi sedikit, pertama itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebagai ide saja 827 itu per hektar berapa biaya penanamannya?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Kalau kita ingin lakukan di gambut dengan tumbuhan yang cukup tinggi, setiap 1 hektar itu bisa 25 juta Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

25 juta 1 hektar?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Iya, sementara untuk membangun sekat kanal 25 juta bisa buat 2 sekat.

Dengan luas dampak pembasahan sampai puluhan hektar dan juga idealnya Pak/Ibu, kita kan harus menanam dengan jenis tanaman yang asli rawa misalnya jelutung, begitu ya, blangirang, dan seterusnya. Jadi kalau

gambutnya belum basah betul, kita tanam dengan tanaman rawa mungkin hidupnya akan merana. Memang idealnya ter basahi dulu, Nah setelah agak basah baru kita tanam dengan tanaman rawa. Tentu kita tidak ingin tanam dengan tanaman lahan kering dia tidak cocok di rawa gambut. Makanya R2 nya memang lebih telap karena ada alasan ekologis dan juga sangat biaya tinggi.

Selanjutnya R3 ada 307 paket dan dimulai dengan kegiatan Desa Peduli Gambut yang terluas memang di Kalteng 69 desa terbanyak, di Riau 49, di Sumsel 43, yang paling sedikit memang di Papua ada 8 kampung mereka sebut atau 8 desa. Total 262 hingga akhir 2018. Kita masih menghitung di 2019. Kalau kita hitung luas total desa dari 262 desa ini ada 3.261.257 hektar. Walaupun kalau kita hitung dengan peta prioritas restorasi 2,67 ini dari 3,26 juta hektar luas wilayah desa itu ada 871 ribu yang berupa gambut yang merupakan daerah prioritas restorasi gambut. Jadi tidak seluruh 3,2 juta hektar ialah gambut dan yang gambut pun tidak semuanya masuk daerah prioritas yang 2 juta hektar sesuai target Presiden.

Selanjutnya, kegiatan Desa Peduli Gambut itu mencakup pendampingan. Kita menaruh Fasdes (Fasilitator Desa) *live in*, tinggal bersama masyarakat selama 1 tahun. Itu membantu pemetaan sosial, ekonomi, dan juga spasial untuk pemanfaatan uang di dalam desa tersebut. Bekerja mereka tentu mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut dalam dokumen perencanaan desa termasuk penggunaan anggaran dana desa. Kemudian memperkuat *resources* lokal. Mohon maaf mundur lagi. Pemberdayaan ekonomi, tadi berupa R3. Ini Fasdesnya membantu pelatihan, membantu perencanaan, penguatan inovasi pengetahuan lokal dengan teknologi tepat guna, kita buat sekolah lapang petani gambut. Ini banyak sekali peminatnya terutama ini mengenalkan teknik mengelola tanpa api bahkan untuk beberapa Provinsi, Kalbar terutama itu Pak Polda nya menurunkan Bhabinkamtibmas, juga Pemda menurunkan Babinsa setiap kali kita melakukan sekolah lapang. Sehingga rekan-rekan TNI Polri juga aktif bisa menjelaskan kepada masyarakat di desa bagaimana mengolah tanpa bahan bakar.

Dan yang terakhir, pemantauan kegiatan restorasi gambut. Kegiatan apa yang sudah berjalan kurang baik perlu diperbaiki. Masyarakat di desa membantu melakukan pemantauan. Selanjutnya ini jumlah total hingga 2018. 2019 masih kita hitung. Ada 13 ribu lebih masyarakat yang terlibat, katakanlah menjadi kader itu ada pelatihan Bumdes 655 orang, aplikasi mitra gambut dengan aplikasi di *smartphone* di Hp Android 2.100. Pemetaan 515 orang dan Jambore ini berkumpul petani gambut dari 7 provinsi berbagi ilmu, saling berinteraksi, ada 1.600 pelatihan tentang peraturan desa melibatkan juga rekan-rekan dari Kumham itu 1.265 dan juga ada kerajinan, pelatihan, dan lain-lain. Tolong *zoom out* kembali. Ya itu jadi kadernya ada berupa guru, para legal atau orang yang dilatih untuk mengetahui. Jadi bukan pengacara dia seperti paramedis, ini para legal program dari Kumham. Ada Dai, ada Pendeta,

Pemuka Agama, ada fasilitator, dan kelompok masyarakat termasuk ibu-ibu. Total jadi 11.275 orang.

Selanjutnya kita juga bersama ya FAO dibantu dengan LSM dan Universitas, BIG, LAPAN mengembangkan kita sebut PRIMIS (Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut) jadi ini rekan-rekan dari Pemerintah daerah, provinsi, KLHK ataupun Kementerian lainnya bisa memantau apa yang sedang terjadi menggunakan citra satelit dari LAPAN di daerah-daerah restorasi gambut terutama di 2,67 juta hektar. Dan masyarakat juga dengan aplikasi Android nya bisa memberikan masukan di tempat ini. Kita ingin gunakan itu tahun depan memprediksi areal yang akan terbakar karena mulai ada pembukaan. Biasanya kan begitu Bapak/Ibu, orang membuka lahan sampai puluhan hektar itu biasanya setelah puncak kemarau akan dibakar untuk penanaman. Dengan adanya pranata informasi ini kita bisa membantu untuk patroli sebelum terjadi pembakaran. Jadi berupa maka untuk pencegahan. Dan juga disebutkan oleh Pak Dirjen ini bermanfaat juga untuk melihat tingkat kebasahan gambut. Jadi dengan sistem kita ini yang kita FAO dan LHK sedang uji coba dengan citra satelit mengestimasi kelembaban tanah. Jadi kalau sudah kering kita bisa upayakan pembasahan melalui misalnya hujan buatan BPPT dan BNPB ataupun pembasahan dengan sumur-sumur atau kanal-kanal yang masih ada air.

Selanjutnya kita telah memasang, sebetulnya ini kalau 2019..

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Kepala BRG maaf saya potong. Saya ingin tahu tadi Pak, itu untuk proses saya kembali sedikit masalah revegetasi Pak ya. Kan Bapak itu tadi mengatakan mengandalkan secara alami Pak. Secara alami itu kita ngomong berapa tahun Pak itu secara alami sebuah ekosistem gambut itu bisa kembali lagi Pak?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Kalau bisa jelaskan barangkali Pak Ketua, ada dua kategori ini Pak. Satu, dia kembali tata airnya jadi tata hidrologi. Yang kedua dia kembali tentu struktur pepohonan dan komposisi jenisnya. Kalau yang Tata air itu bisa kembali dalam kurun waktu barangkali 10 sampai 20-30 tahun. Ini tergantung tingkat kerusakan gambutnya Pak. Kalau gambutnya sudah rusak parah itu pasti butuh waktu lama dan juga pembasahannya itu harus satu unit, tadi yang kesatuan hidrologi. Jadi kalau kita basahkan bagian selatannya saja, utaranya itu masih ada kanal yang mengeringkan, kan akhirnya bagian selatannya juga kering karena air tertarik ke kanal di utara jadi harus seluruh Kesatuan Hidrologi Gambut.

Itu pun masih butuh puluhan tahun. Ini pengalaman dari berbagai negara yang telah melakukan kegiatan restorasi gambut di Eropa, di Jepang, di Amerika, mereka butuh waktu puluhan tahun. Di Jepang itu yang saya pernah lihat mereka lakukan 10 tahun, merestorasi 300 hektar. Bisa dibayangkan tata airnya sudah membaik, itu 10 tahun hanya 300 hektar. Tapi kalau jenis tanamannya belum kembali Pak. Jenis tanamannya dengan suksesi alami itu bisa membutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun.

Nah tujuan kita tentu telah lahan konservasi harus dikembalikan seperti aslinya. Tapi kalau lahannya budidaya cukup tata airnya yang kembali karena di atasnya tentu untuk budidaya masyarakat perikanan, hortikultura, atau tanaman kayu, atau buah-buahan dan seterusnya.

Saya lanjut Pak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak, lanjut Pak.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Terima kasih.

Untuk pemantauan, kebasahan gambut ini penting sekali untuk mencegah kebakaran. Penting sekali juga evaluasi refleksi kepala kami Pak. Jadi setelah kami bangun sekat kanal, betulkah gambutnya lebih basah dari sebelum ada? Nah ini kita lihat dari pemasangan alat tinggi, pemantauan tinggi muka air. Tadi Pak Dirjen ceritakan ada alat yang *real time* dengan data *logger* langsung dikirim setiap 1 jam datanya masuk. Ada yang masih dengan manual. Kami fokus menggunakan alat yang *real time* terpasang 142 hingga 2018 di 2019 ini terpasang 172, jadi ditambah 30 lagi tersebar sebagai provinsi. Jadi dia setiap jam dia kirim data tentang tinggi muka air, tentang kelembaban tanah, tentang suhu tanah, dan juga curah hujan.

Dan kalau kita bisa analisis dengan melihat sejarah curah hujan selama misalnya 5 atau 10 tahun ke belakang, itu kita bisa membuat model, memprediksi kira-kira akan seperti apa tingkat kebasahannya. 10 hari dari sekarang tentu dengan data BMKG 20 hari dan 30 hari. Sehingga neraca air bisa di kita perhitungkan dengan lebih baik dan kalau butuh intervensi pembasahan yang darurat karena sudah musim kemarau. Misalnya kita sekarang di bulan Agustus sudah kemarau itu bisa dilacak dengan lebih akurat dan lebih efisien.

Ini yang sedang kita kembangkan bersama KLHK, bersama BNPB, BMKG, BPPT sehingga nanti kalau pembasahan dengan struktur infrastruktur

berupa sekat kanal tadi tidak cukup, kita ingin pembasahan melalui modifikasi cuaca. Jadi hujan buatan bukan lagi untuk memadamkan api, hujan buatan untuk pembasahan gambut. Dan ada pengalaman bagus dari rekan-rekan ESDM, PLN dan BPPT karena di musim kemarau ketika waduk-waduk kering itu dilakukan hujan buatan untuk memenuhi air waduk dan itu mampu dilakukan. Kita ingin melakukan hal yang sama tapi untuk membasahi gambut dan mencegah kebakaran ini kita rancang tentunya harus bersama perhitungan tata air yang akurat sehingga tidak ada pemborosan pemakaian anggaran negara.

Selanjutnya untuk realisasi di 2019, hingga ini 1 Desember 2019 realisasi di BRG Pusat 76%. (rekaman terpotong) Ya itu apakah Sekda atau Asisten Gubernur, ini Bapak Kepala Dinas dan Ibu banyak hari ini hadir dari 7 provinsi. Mereka mendapatkan anggaran berupa dana tugas perbantuan jadi anggaran dari LHK kepada BRG itu akan dibagi lagi menjadi dua kurang lebih. Kalau di 2019 misalnya Bapak/Ibu lihat untuk BRG Pusat 150 miliar untuk BRG yang ada di 7 provinsi 159 miliar atau 160 hampir. Dan ini menjadi DIPA masing-masing provinsi. Jadi KPA nya ada di provinsi pelaksanaannya tapi ini memfasilitasi dalam perencanaan dan juga bantuan teknis pelaksanaan dan juga *supervise*. Dari tugas perbantuan skema ini, skema ini pencapaian 51,55%. Yang tertinggi di Papua 92%, yang masih agak rendah di Sumatera Selatan 37,9% ini memang ada kendala administrasi.

Tapi kalau kita hitung dengan *outstanding* kontrak yaitu mencapai 71% di tugas per bantuan dan 80% di BRG Pusat dengan rata-rata 76%. Yang tertinggi kembali memang di Papua, yang terendah Sumatera Selatan 63,67%. Prognosis sampai akhir tahun kita perkirakan bisa 92% dengan komposisi 90% di pusat dan 88% di 7 provinsi. Dan di prognosis ini memang yang masih agak rendah di Kalimantan Selatan 70% hingga akhir tahun dan ada beberapa kendala.

Selanjutnya, saya kira ini bisa Bapak/Ibu lihat kalau memang dari Dapil Riau nanti yang lain itu jumlah sumur bor yang dibangun, sekat kanal ataupun penimbunan kanal di berbagai daerah yaitu di Provinsi Jambi. Jadi Provinsi Sumatera Selatan per 27 November, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Selatan dengan target 100% memang dan di Papua. Papua kebutuhan untuk program fisik sudah selesai semua. Pengelolaannya dikelola dengan sangat, ini oleh Pak Bupati. Ini terutama di 2 Kabupaten dan Pak Bupati langsung turun tangan. Jadi kami berterima kasih untuk Pemprov dan Pemkab terutama Mappi dan Merauke di Papua.

Selanjutnya yang 2020 kalau bisa kami waktu untuk menjelaskan, kami bekerja akan berada di 39 KHG terbagi di 7 provinsi, anggaran 312 miliar terbagi di pusat ada 162 dan tugas perbantuan masing-masing provinsi total 150 miliar. Selanjutnya kalau dibagi di BRG dengan 4 ke deputian dan 4 pekerja kami yaitu di perencanaan ada 27 miliar, di bidang konstruksi operasi dan pemeliharaan ini memang meliputi deputi yang paling berat dalam membangun sekat kanal dan seterusnya ini ada 50. Deputi ketiga yang mengurus tadi di

Desa Peduli Gambut, edukasi sosialisasi 16 miliar. Deputi Litbang itu ada 16 miliar. Litbang itu yang termasuk tadi yang memasang alat-alat pemantauan tinggi muka air dan menganalisis datanya.

Selanjutnya, kalau ini dibagi berdasarkan provinsi, Bapak/Ibu bisa melihat menyusun dari Riau 23 miliar, Jambi 6,5, Sumsel 31, Kalimantan Barat 21,5 miliar, Kalimantan Tengah 53,5 miliar, Kalimantan Selatan 4,5 dan Papua 9 miliar. Ini kalau dibagi menurut provinsi. Tentu sudah terbagi kegiatannya nomor 1 pembuatan sumur bor, sampai nomor 14 pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa. Silakan Bapak/Ibu nanti bisa mencermati lebih dalam.

Selanjutnya untuk kegiatan restorasi gambut, ini dibagi per KHG dan per kabupaten dengan jumlah sumur bor sekat kanal R1 dan R3 tadi berupa ekonomi, kita pakai bantuan Bapak bisa lihat. Riau, Jambi, ini dan Sumatera Selatan silakan nanti ada masukan serta Bapak/Ibu yang mewakili Dapil daerah-daerah ini. Selanjutnya di Kalimantan Barat, Kalimantan tengah dan di Papua.

Kami minta waktu memberikan beberapa contoh kegiatan R3 Ini budidaya di lahan gambut ini penting sekali karena kita semua percaya kalau masyarakat dapat memanfaatkan gambut dengan lestari maupun secara kesejahteraan juga lebih baik itu tentu akan menjaga termasuk menghindari kebakaran. Jenis-jenis tanaman contoh untuk kedalaman gambut 2 sampai 4 meter yaitu jelutung, pulai, jengkol, pinang, geronggang, ini kita banyak mendapatkan masukan tentu dari masyarakat selain para pakar ekosistem rambut.

Pertumbuhan tanaman mohon maaf ya, pertumbuhan tanamannya itu yang 2 sampai 4 meter yang kedalaman 34 meter itu sudah mencapai ketinggian 147 cm dengan diameter 4,6 dan Bapak bisa lihat, ini berbagai progres penanaman tentunya untuk tanah gambut yang dangkal di bawah 2 meter itu juga ada tanaman hortikultura, tanaman pangan. Misalnya kacang, cabai rawit, tomat, pare, terong dan seterusnya. Masyarakat tentu membutuhkan tanaman yang cepat dihasilkan dengan estimasi produksi kacang tanah 1,1 ton per hektar, tomat itu yang tinggi sekali karena ya memang produktif 5,9 ton per hektar. Dengan model *agroforestry* ya Bapak/Ibu dicampur tanaman hortikultura dan tanaman kayu-kayuan.

Selanjutnya untuk *agrosilvofishery* ini Ibu Kiki contoh dari OKI ini. Kita kerja sama dengan Litbang KLHK itu yang bentuknya seperti huruf U itu adalah kanal yang dibangun mengelilingi plot tanaman pangan. Dan kanal yang bentuk U itu menjadi lokasi perikanan, budidaya perikanan. Lokasinya di Kedaton 2,5 hektar dan hasilnya sampai sekarang kita lihat sangat baik dan siap diaplikasikan untuk masyarakat sekitar.

Selanjutnya vegetasi tadi Pak Ketua menanyakan jenis meranti blaringan juga di OKI, ini bekerja sama juga dengan Litbang LHK. Kalau kita bisa melihat dari bekas terbakar 2015, ditanam mulai 2017 dan Juli 2016 tanaman yang mungkin sudah sekitar 2 meter lebih tanaman-tanaman. Dan

kalau hortikultura nya bayam, tomat, jagung, cabai, daun bawang, kangkung, ikan itu juga yang paling bawah sebelah kanan berbagai macam ikan. Ini semuanya ikan-ikan gambut, ikan rawa, ada betok, ada lele gabus, ada soang, sepat, (suara tidak jelas) dan lain-lain.

Selanjutnya pola pemanfaatan lahan gambut di Tanjung Jabung Timur, Jambi ini juga contoh dengan pola tanam *agroforestry*. Tanaman jelutung di sela tanaman sawit dan lahan masyarakat yang tanam sawit juga tanaman lada, kita coba, dan nanas ternyata bisa tumbuh dengan baik. Ini memang gambut yang agak dangkal, kedalaman di bawah 1 meter. Di sini juga ada kanal walaupun belum ada sekat. Tinggi muka air tanahnya dalam sekali jadi kita harus tata airnya dan sembari mengenalkan berbagai macam tanaman ke masyarakat. Selanjutnya budidaya sagu terkenal Pulau Meranti di Riau. Jadi sagu tanaman yang cocok di lahan gambut, semakin basah gambutnya semakin tinggi dan semakin besar tanaman sagunya. Semakin cepat dia tumbuh.

Kalau kita mana memanen pohon sagu dan 8 tahun itu bisa 50% lebih produktivitasnya kalau gambutnya basah dan masyarakat telah adanya turun-temurun membudidayakan tanaman sagu. Mereka juga secara Swadaya membuat kilang-kilang sagu, kita bantu juga bersama Pemprov kilang-kilang sagunya. Dan sekarang sedang kita coba selain tepung sagu nya itu dimanfaatkan, kita coba juga limbah sagu nya untuk makanan ternak. Ini akan dimulai akhir tahun sehingga sampai tahun depan sehingga pendapatan masyarakat bisa menambah. Tidak hanya tepung sagu nya tapi limbah-limbah sagunya juga bisa dijual untuk makanan ternak terutama peternak dari Batam membutuhkan banyak sekali pakan ternak dan dari Kepulauan Meranti ke Batam jaraknya relatif dekat dengan perahu jadi ini pangsa pasarnya sangat menjanjikan untuk pakan ternak.

Selanjutnya kita juga coba dengan madu kelulut ini khusus kalau Bapak/Ibu sering juga Sumatera, lebah kelulut itu lebah yang tidak menyengat. Jadi kalau diganggu manusia kita tidak usah takut tersengat. Memang madunya warnanya juga unik karena agak kuning bukan coklat hitam, itu agak kekuningan tapi agak asam walaupun katanya khasiatnya sangat baik, luar biasa ya Pak Dirjen untuk berbagai hal. Kita membudidayakan ini termasuk juga yang terakhir saya cerita, purun ini sangat berpotensi menjadi tanaman atau tanaman yang tumbuh dengan liar di lahan gambut untuk kerajinan.

Selama ini sudah dilakukan oleh Ibu-ibu. Tetapi produknya mohon maaf kualitasnya seadanya. Tapi kita sekarang ini Pak ada desainer terkenal, terkenal *eco fashion* karena beliau ini dan sudah banyak membuat *fashion show* di berbagai tempat di Eropa, Asia. Kita meminta beliau membina *product development* dan kita ingin tanaman purun ini merupakan kerajinan itu masuk ke pasar premium menggunakan juga kain sutra. Sutranya bukan dari lahan gambut, tapi pewarnanya dari gambut. Jadi tanaman-tanaman tertentu diajarkan bagaimana diolah menjadi pewarna, pewarnaan terhadap bahan sutranya dikombinasikan dengan tas-tas. Jadi kalau nanti ketika Ibu kalau kami siap sudah, saatnya kita prosesnya ke Ibu-ibu.

Ini tas purun nya penuh dengan motif yang indah di luar, warna alami, di dalamnya dibungkus dengan kain sutra, di dalamnya. Jadi premium lah ya dan beberapa Perintah sahabat itu tertarik mau membantu mempromosikan di negara mereka. Dan ini semoga tahun depan bisa banyak bergulir. Purun ini kita. Purun ini kita lakukan baik di Kalsel maupun Sulsel. 2 lokasi di mana telah ada karena pusat kerajinan purun.

Selanjutnya jadi kegiatan R3 ini memang berbasis lahan dengan *quality culture*, dengan peternakan dan PLTB (Pengolahan Lahan Tanpa Bakar) saya tadi lupa menceritakan salah satu peternakan telur bebek itu sekarang masyarakat petani-petani di gambut Itu menggulirkan ide beternak bebek makannya dibikin dari lahan gambut, kita coba. Jadi mengurangi membeli pakan dari impor ya. Nah telur bebeknya dijadikan telur asin, apa pun bahan bebek.

Dan di khusus di Riau misalnya. Selama ini Riau masih membeli telur bebek dari Sumsel dari Sumut, dan jadi Sumbar mohon maaf. Jadi pedagang telur bebeknya, *committed* membeli telur bebek dari petani setempat kalau memang sudah bisa secara reguler. Menghasilkan memang biasanya mintanya berapa sih? 10 ribu butir per hari begitu. Jadi ini kita bina terus bersama Pemerintah Daerah setempat di sini Dinas Peternakan. Jadi sehingga hampir peternakan pun kami turun karena sesuai dengan aspirasi masyarakat petani gambut di lokasi tersebut.

Yang kedua berbasis air. Nah ini (suara tidak jelas) perikanan. Ada rekam dari Kalteng, Pulang Pisau pejabat Bappedanya mencoba perikanan dengan embung di Kalteng dan sekali panen konon bisa dapat puluhan juta rupiah, dapat 45 ton ikan. Ikan-ikan rawa gambut. Nah ini kita akan coba juga bersama masyarakat, dengan Pokmas-Pokmas menggunakan Dana Desa maupun dana APBD dan dana APBN dari sini.

Selanjutnya contoh-contoh foto-foto peternakan dan pertanian hortikultura. Nanas, kita bekerja sama dengan Javara yang ada di Kemang. Mereka melatih petani mengolah nanas menjadi keripik dengan standar industri dan Javarta siap menjual berapa pun nanas keripik yang dihasilkan oleh petani gambut. Jadi mereka kemas dengan sangat bagus. Di jual, dengan harga tidak murah di Kemang oleh Javara. Nah dia sudah 900 produk lokal dan Presiden juga melalui Pak Teten juga mendorong kalau bisa itu menjadi unggulan. Ekspor unggulan karena khas dari gambut ataupun dari tanaman lain di Indonesia.

Memang kendalanya kembali petani harus secara reguler bisa memproduksi sekian kuintal keripik nanas per bulan. Ini sedang kita upayakan agar Javara bisa menjual dengan baik. Ada juga kopi, Bapak tahu di Jambi terkenal, di Sumsel, Riau. Kopi liberika dan mencoba dengan anomali untuk mempopulerkan kopi liberika. Ini kopi yang paling enggak populer. Biasanya kan kopi arabika yang populer. Kalau Lampung dan Riau robusta.

Liberika ini harganya di atas robusta tapi jauh masih di bawah arabika. Kalau di minum kadang-kadang orang tidak terlalu suka jadi harus dicampur dengan arabika atau robusta. Katanya hanya populer di Malaysia dan pesisir Sumatera. Nah kita ingin juga mempopulerkan di berbagai kafe di Indonesia atau di luar negeri. Apalagi kalau ada berita bahwa kopi lahan gambut, kopi yang ramah lingkungan, kopi yang bisa membantu selain mengentaskan kemiskinan tadi juga pengendalian perubahan iklim.

Selanjutnya jasa lingkungan kita telah mulai dengan ekowisata yang paling kanan itu pembuatan kapal wisata. Bisa mengangkut 40 orang, ini yang di Katingan di Kalteng. Jadi paket susur sungai dengan perahu besar kemudian akan masuk ke sungai-sungai kecil bekerja sama dengan TN, Taman Nasional Sebangau menggunakan perahu kecil dan membuat *homestay*. Masyarakat setempat dilatih tentu untuk mengelola logistik perkapalannya, mengelola *homestay* nya. Kita sudah berkali-kali ke sana dengan Pak Bupati dan makanan yang dimasak oleh ibu-ibu dengan ikan-ikan lokal, sayur Pakis, sambal itu enak sekali. *Homestay* ini misalnya di TN Sebangau telah menerima 3000 wisatawan asing.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Interupsi Pak Pimpinan.

Saya minta Pak, fokus ke gambut jangan merambah ke mana-mana. Ini seperti penjelasan Bupati ini namanya.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa enggak apa-apa, sedikit lagi saja Pak BRG. Saya rasa ini tapi menarik juga untuk didengarkan Pak Bambang. Ini kan turunan-turunan yang bisa kita pikirkan untuk pengembangan berikutnya Pak Bambang. Jadi saya rasa enggak apa-apa kita dengarkan sedikit lagi lah. Kita harap tidak lama lagi.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Sudah hampir habis Pak ya. Mohon maaf, ini bagian dari R3 Pak. Jadi memang masyarakat ekosistem gambutnya harus kita dukung Pak bersama Pemda.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan boleh sedikit?

Jadi penjelasan dari Bapak tadi merupakan bagian dari R3 juga jadi apa yang bisa kita libatkan dari anggota dewan itu juga ke tempat-tempat wilayah

yang Bapak sebutkan begitu. Karena dari tadi saya dengar itu tidak ada. Jadi Bapak tadi hanya menyebutkan berbagai program-program saja, sedikit anggaran, terus kemudian yang akan dilakukan, hasilnya pun tidak terdengar oleh kita, kendalanya pun juga enggak, solusinya juga belum.

Terima kasih.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Terima kasih Ibu masukannya.

Jadi yang terakhir tentang kendala, tantangan. Selanjutnya jadi regulasi secara lengkap dan permanen memang belum ada semua. Sudah cukup lumayan tapi memang perlu diperkuat. Nomor dua, banyak data-data masih berupa indikatif, tadi peta-peta tadi harus kita hasilkan jauh lebih cepat. Yang ketiga konsep pengelolaan berbasis KHG belum dapat diaplikasikan sepenuhnya. Ini masih dalam tahap menuju ke sana.

Kita bahas baru 20, enggak bisa banyak contoh lebih baik. Yang keempat peran Pemerintah Daerah masih perlu dioptimalkan memang karena baru mungkin 3 tahun terakhir ini Pemerintah Daerah turun banyak bersama kita semua untuk perbaikan gambut, sekarang masih banyak yang perlu dioptimalkan termasuk penguatan SDM. Yang kelima, restorasi gambut ini banyak mengelola keterlanjuran karena ekosistemnya sudah rusak oleh berbagai macam program transmigrasi dulu-dulu maupun konsesi yang kandung keluar.

Kami catatan Ibu, untuk ke depannya akan lebih sering berkonsultasi 3 ton dengan periode Komisi IV sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anggota DPR Komisi IV terutama dari Dapil bersangkutan untuk ke daerah walaupun mohon maaf, untuk khusus ekosistem gambutnya mungkin harus kami petakan ulang Bapak/Ibu karena seingat saya periode sebelumnya tidak banyak anggota Komisi IV yang berasal dari Dapil yang ada gambut yang banyak mohon maaf dari Dapil, maaf di luar gambut. Biasanya yang kita ajak itu tidak terlalu banyak karena juga kesibukan nanti kita upayakan terus.

Terima kasih Bu.

Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan arahnya kami selalu memohon terus-menerus dari anggota dewan yang terhormat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Yang kami hormati Bapak Kepala BRG serta para Dirjen.

Terima kasih atas paparan dan informasi yang telah Bapak berikan sebelum kami berikan kesempatan bagi anggota untuk memberikan

tanggapan. Tadi sudah mulai ada beberapa suara Pak Dirjen dan Pak Kepala BRG dari teman-teman anggota. Mungkin ada beberapa yang baru bergabung di Komisi IV memang periode banyak keterlibatan anggota Komisi IV yang mempunyai lahan gambut di Dapilnya. Tapi tadi saya rasa permintaan dari anggota juga cukup baik. Tadi dari berbagai macam program yang Bapak paparkan secara sah itu sangat penting bila nanti ada koordinasi yang baik dengan anggota di Dapil mereka masing-masing.

Contohnya tadi saya beberapa kali mendengar Mbak Kiki ya? yang sudah banyak komunikasi tentang Dapil jadi Sumsel dan mungkin ke depannya bagian yang anggota yang berasal dari Dapil Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, ini bisa lebih banyak mengobrol bersama Pak Kepala BRG supaya bisa terlibat dalam perencanaan maupun nanti program-program BRG ke depannya. Saya rasa kita mau mulai ya Bapak/Ibu untuk,

Kalau kita skor sekarang Bapak, nanti ini kita enggak tahu yang kembali lagi berapa orang lagi Bu, Bapak ya pengalaman saya dari kemarin saya memimpin rapat itu beberapa kali, saya skors itu nanti yang kembali itu paling cuman tiga atau empat. Jadi dengan segala hormat Bapak/Ibu kita teruskan dulu ya. Ini di sini saya lihat cuman ada 8 pertanyaan, jadi enggak terlalu banyak. Kalau para anggota pertanyaannya cepat, tepat, ringkas mengikuti tata tertib yaitu 3 menit itu bisa selesai dalam 30 menit. Baru kita bisa skors sebentar setelah kita berikan waktu untuk Bapak-bapak memberikan tanggapan.

Saya persilakan ini ada 8 penanya, mulai dari Pak Bambang Purwanto. Silakan Pak.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

**Pimpinan yang saya hormati dan Pak Dirjen
Serta Pak Kepala BRG.
Hadirin yang berbahagia.**

Kalau melihat pentingnya kita mengelola gambut. Gambut ini menyediakan karbon kemudian ketika terbakar ini penyumbang emisi gas rumah kaca 50% di Indonesia. Kemudian ketika kebakaran juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena semua aktivitas terhenti. Oleh karena itu pengelolaan gambut ini sangat penting di Indonesia mengingat luas-luasnya sampai 24,6 juta hektar. Ini perlu menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah. Dan kami dari Komisi IV sepakat untuk mendorong agar pengelolaan gambut ini dilanjutkan. Dan terpenting lagi agar ini dikelola secara fokus oleh BRG sehingga sangat tepat.

Oleh karena itu tadi saya sampaikan jangan ke mana-mana karena itu wilayahnya dinas badan lain. Itulah pentingnya kerja terpadu antar lintas sektoral untuk membangun di wilayah gambut tertentu ini perlu legalitas dari

kehutanan karena kalau ada legalitas dari kehutanan tentu mereka juga akan takut. Kemudian perlunya dibuat pemetaan secara spesifik terkait dengan karakter gambut di masing-masing wilayah juga termasuk kedalaman gambut tentu penanganan pasti akan berbeda. Tadi saya lihat yang ditayangkan itu gambut yang di topografi rendah sehingga kanal memang tepat, tetapi ketika topografinya tinggi dari permukaan air laut ini berbahaya juga. Ini pengalaman saya di lapangan.

Kemudian tadi disinggung terkait dengan penyelesaian termasuk solusi hujan buatan. Hujan buatan ini biaya luar biasa Pak Ini pengalaman kami mengendalikan Karhutla. Ini sangat besar biayanya, sekali terbang berapa ratus M begitu. Sehingga perlu langkah yang lebih tepat seperti pembuatan sumur, kemudian sekat kanal, kalau embung ini bukan merestorasi gambut tapi justru membuka wilayah gambut ini juga bertentangan. Kemudian lakukan evaluasi seperti apa efektivitasnya sumur. Seperti yang kami lihat kemarin itu kalau sumur itu kan cuman kecil volume airnya. Kalau yang di tengah ini tadi belum dibahas. Yang di wilayah agak dalam dari jalan atau dari kampung, ini dari mana sumber airnya? Itu juga harus dipikirkan.

Saya pikir Bapak-bapak enggak usah takut, sampaikan apa permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam rangka melakukan pembasahan gambut. Kami akan berikan dukungan sepenuhnya karena kalau nanti tahun depan itu terjadi kebakaran lagi yang disalahkan termasuk Komisi IV nanti. Tapi ketika misal sudah memberikan rekomendasi, *support* terhadap teman-teman tapi tidak direspons, nah kami tagih nanti kalau terjadi. Seperti kemarin kami sarankan untuk membuat perpipaan, karena kalau di tengah air sumur siapa yang menjaga di dalam? tapi kalau disupir dari luar artinya tinggal menjaga. dieselnya sehingga pembasahan gambut di wilayah dalam pun bisa terjaga Kuncinya di situ.

Jadi saya minta BRG fokus terhadap pembahasan gambut. Berapa dana yang diperlukan sampaikan nanti, kami *support* karena ini sangat penting bagi negara kita. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Bambang.

Selanjutnya Mbak Riezky Aprilia, kami persilakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya pertama juga ingin menyampaikan perihal penting yang mungkin terakhir dengan LHK saya karena ada keperluan lain sehingga saya harus izin. Karena kebetulan ada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Pak, saya mohon dengan segala rasa hormat saya Pak. Kami punya PMKS yang mulai rusak Bapak. Saya mohon Pak Sumatera Selatan itu hampir semua wilayah bukan hanya sawit yang menyebabkan tapi sekarang efek tadi tambang.

Saya menyuarkan dari masyarakat saya. Mungkin di sini ada dari Sumatera Selatan katanya, ada? Bapak saya mohon di sini kita tadi Pak Ketua juga sempat sampaikan lebih baik kita berbicara apa adanya. Dan saya tahu ada beberapa, saya juga paham ada beberapa regulasi terbentur dengan tindakan yang harus Bapak ambil tapi mau tidak mau kalau kita mau bicara menyelamatkan lingkungan saya mohon kita diskusi FGD atau seperti apa terkait ini.

Kemudian tadi saya memang betul sempat diskusi dengan Bapak Dirut BRG ya. Tadi saya sempat mendengar atau saya tidak salah, mohon dikoreksi ya. Ada kendala administrasi terkait BRG di Sumsel ini nantinya. Saya mohon nanti untuk terkait dengan kendala administrasinya saya ingin tahu terkhusus dari Sumsel. Saya kepingin tahu lebih baik kita buka-bukaan, ada apa? administrasinya di mana? saya *support* OKI tapi ada juga wilayah lain juga kan yang memang harus perlu atensi. Banyuasin, Muratara, Musi Rawas mungkin sebagian begitu.

Nah saya mohon kejelasan terkait tadi kurang lebih dalam tanda kutip kendala administrasi apa kita sama-sama cari solusinya, kan begitu. Kemudian saya hanya berharap satu hal, bahwa banyak penduduk yang di sekitar gambut ini untuk kita sama-sama adakan penyuluhan atautkah pelatihan atautkah apa. Mungkin OKI tadi bisa jadi percontohan kan begitu, karena ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat di situ. Kita sama-sama tahu masyarakat Sumsel itu di antara perkebunan sawit dan di antara perkebunan karet. Dua-duanya enggak ada untungnya itu buat masyarakat Pak saya jujur saja. Perkebunan itu banyak mudaratnya itu. Apalagi sawit.

Saya dari awal konsisten ngomong saya menolak perkebunan sawit itu. Saya lihat harganya naik-naik, kan begitu. Nah jadi kalau memang gambut ini, saya masih punya harapan di gambut. Ayo sama-sama Bapak kita cari solusinya. Saya sepakat tapi Bapak bilang ada apa kerajinan tangan. Ayo kita gerakan kaum perempuan, kan begitu ya. Perempuan ini kan kadang-kadang kita juga enggak tega mereka jadi buruh dan segala macam untuk menyadap karet, suaminya juga menyadap karet, anaknya enggak sekolah kan begitu. Jadi harapan saya ini gerakan humanis lah yang harus kita pertimbangkan juga di sini.

Sekian Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Mbak Kiki.

Kami persilakan Pak Hamid Yasin.

F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan Bapak Budisatrio.

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pimpinan, Pak Dirjen dan Pak Kepala BRG beserta segenap jajarannya yang saya hormati.

Anggota Komisi IV yang tersisa kini masih berapa ini? 9. 9 kekuatan kita Pak. Terima kasih atas waktunya.

Saya berada di kawasan yang jauh sekali dengan kawasan gambut Pak. Saya di Jawa Tengah tetapi saya sangat peduli dengan gambut. Beberapa hari yang lalu kita bersama dengan Pak Budisatrio juga ke kawasan Riau, di Kampar melihat kawasan gambut yang terbakar. Dadi disampaikan bahwa luas lahan gambut kita itu ada 14,9 juta setara dengan 7,8% luas wilayah daratan Republik Indonesia. Hampir semua titik, hampir ya tidak semuanya. Hampir semua titik kebakaran hutan itu berada di kawasan gambut.

Yang ingin kami tanyakan dari BRG ini peran dalam mengantisipasi, artinya tindakan preventif yang dilakukan oleh BRG terkait dengan *problem* kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi. Ini apa yang sudah dilakukan? tentu harapan kami BRG ini bisa sinergi kemudian kolaborasi dengan seluruh *stakeholder*, dengan pihak-pihak yang ada dalam rangka mengantisipasi karena antisipasi ini lebih bagus daripada nanti tindakan setelah terjadi kebakaran Pak. Karena kalau kita melihat latar belakang dibentuknya BRG ini kan dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembangan fungsi hidrologi gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus sistemis, terarah, terpadu, dan menyeluruh kan *spirit* nya itu.

Kemudian yang kedua mungkin simpel saja Pak ini konsep pemulihan ekosistem apa yang mungkin dicanangkan atau dilakukan oleh BRG dalam rangka pemulihan terutama hutan lahan gambut pasca terjadi kebakaran. Kemudian yang ketiga saya ini belum tahu persis bagan yang ada di BRG Pak. Ini jumlahnya berapa? karena kalau dilihat beban kerjanya dengan kawasan yang seluas 14,9 juta luar biasa luas. Kira-kira Apa yang dilakukan dalam rangka. Optimalisasi peran dan fungsi SDM yang ada di Badan Restorasi Gambut terkait dengan sinergitas juga dengan *leading sector* yang lain dan Kehutanan bahkan dengan *stakeholder* yang ada di daerah, mungkin gubernur, bupati, dan sebagainya.

Saya rasa itu Pak Budi sedikit saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Hamid.

Jadi Pak kepala BRG dalam Kunspek kita yang pertama kita akan berbagi di dalam empat kelompok. Saya tanpa Hamid kebagian ke Riau untuk meninjau satu lahan yang terbakar akibat kebakaran kemarin. Dan kemarin sudah ada diskusi ya Pak Hamid ya? kita ingin mencoba, kemarin kita bicara sama Pak, yang menemani kita dari BRG Pak siapa ya namanya? Pak Aris. Apakah kita bisa itu kita alokasikan tempat itu sebagai salah satu contoh untuk pemulihan dengan sistem yaitu dia, kita bikin apa istilahnya yang kita gunakan ya Pak? Untuk pemulihan yang di Riau itu Mbak Ita? *Role model* ya? Istilahnya *role model* untuk nanti bisa jadi contoh Pak. Moga-moga Bapak bisa *support* kita juga supaya nanti itu benar hasilnya kelihatan.

Saya persilakan selanjutnya Kang Asep. Silakan Pak.

F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy):

Terima kasih.

Assalamualaikum, wassalamu 'ala manittaba'al huda.

Pertama saya ingin menyampaikan acungan jempol buat Pak Dirjen PPKL, karena apa? naskahnya ini enggak boros. Pakai bolak-balik. Yang lain kan apalagi dari BRG sampai setebal ini. Kalau ikut Bapak ini, ini bisa setengahnya. Jadi ini bisa menghemat anggaran yang cukup bisa begitu Pak. Kalau dulu ingin seperti ini sulit, kalau sekarang kan jamannya teknologi. Atau bila mungkin enggak usah ada begini Pak, cukup pakai *software* saja. Cukup pakai *softfile*.

Karena sekarang ini kan kayaknya sudah enggak ada anggota dewan yang enggak melek teknologi informasi. Dan itu bisa dibaca di mana pun, enggak usah ribet-bawa bawa kayak begini atau juga bisa bahkan sambil tiduran. Sekretariat juga enggak dibikin sulit harus bagi-bagi buku. Cukup sekali tekan, ke mana-mana. Ini juga saya sampaikan saya pernah kunjungan ke Bahrain. Jadi itu seluruh anggota DPR nya itu boleh dibilang wajib punya tablet. Jadi kalau sekarang ini di kita ini berjejanya apa, di sana berjejanya adalah tablet semua. Ini serius saya acungkan jempol Pak.

Selanjutnya langsung ke kepala BRG ya. Walaupun sama dengan itu, saya bukan di daerah gambut. Tapi ada yang mengganggu pikiran saya Pak. Ada gambut, ada humus, apa beda? Gambut sama humus? terlebih di sini ada disebutkan bahwa masyarakat di dalam bercocok tanamnya yang tadi ada nanas dan sebagainya tidak memerlukan pupuk karena mungkin gambut itulah

menjadi pupuk. Namun demikian Pak, sering saya juga sampaikan di sini bahwa masyarakat kita ini banyakannya latah. Tetangganya sukses bertanam cabai. Tentu saja dengan sukses itu dengan keilmuan. Lalu juga ikut dia tanam cabai pula tapi rugi karena enggak ada ilmu, enggak ada paham.

Seperti kalau kita tanam nanas, asal tanam saja akan berbeda kalau kita kelola dengan baik. Untuk itu untuk mendorong supaya masyarakat ini bertani di lahan gambut ini mau bertani di lahan gambut, yang pertama masyarakat diberi tahu juga sih berapa tahun sih gambutnya? kemudian cocoknya apa? tadi saya dengar pohon pinang Pak ya? Pohon pinang saya pikir apa bisa di lahan gambut? tegakan yang begitu tinggi, akarnya di situ saja sementara kondisi gambut itu enggak keras. Atau pinangnya tidur? ya mungkin kalau pinangnya tidur tetap tumbuh juga enggak apa-apa. Itu lebih baik lagi enggak usah naik-naik lagi itu kan. Apalagi paket Haji cukup petik sambil jalan saja.

Kemudian saya teringat di Brebes itu petani bawang merah cukup bagus. Sering kali produksi bagus dan berlimpah tapi jadi sampah, kenapa? harga enggak terkendali. Bingung jual ke mana. Maka dengan hal ini diharapkan, jadi tentu saja BRG ini enggak bisa jalan sendiri meski bersama-sama dengan Kementerian-Kementerian atau Lembaga-lembaga yang lain semisal dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kalau saya lihat kan BRG hanya bagaimana supaya gambut itu tadi basah. Kalau urusan taninya itu bukan bagian BRG. Ini kerja samanya dengan pertanian. Dalam hal ini juga setelah berlimpah, kadang bagus tidak tahu cara penyimpanan. Bagaimana cara penyimpanan? jadi harus ada perlakuan pemberian pasca panen. Kalau nanas di dipanen, di mana menyimpannya? seperti apa menyimpannya?

Kemudian tadi ada saya dengar juga ada keripik dan sebagainya. Itu cukup bagus, di tempat saya juga ada Pak. Ada keripik nanas, keripik salak begitu. Tapi ternyata juga mesin-mesinnya cukup mahal. Kalau masyarakat biasa saya pikir enggak bisa bikin karena nanas airnya sangat tinggi perlu alat mesin yang sangat bagus juga untuk bisa mengambil kadar airnya yang lebih tinggi kalau akan dibuat keripik. Maka dari itu mereka juga harus diberikan bagaimana cara pembuatan keripik dibantu pula mesinnya. Lagi-lagi hanya produksi berlimpah, pasarnya enggak ada? Maka pasar juga perlu diperhatikan. Ke mana jualnya? Contoh, tadi ada talas Pak. Mungkin bagi sebagian orang tidak tertarik dengan talas. Tapi sangat tertarik.

Beberapa waktu lalu ketika pertama kali masuk di Komisi IV saya ada kunjungan ke luar negeri ke Jepang, ternyata di Jepang meneliti pengganti beras karena beras dinyatakan memicu atau tidak aman bagi penderita diabet atau bahkan mengakibatkan diabet. Penggantinya ternyata adalah talas. Boleh jadi kita pemasok talas terbesar ke Jepang. Mereka juga perlu diberikan *brand*, *labelling*, beri nama. Karena apa? kita sering kali produk-produk atau yang kita miliki ini, *label* nya, *branding* nya dimiliki orang. Kaya jambu apa yang terkenal? jambu Bangkok, Durian? yang terkenal durian montong. Montong kan Cina ya? Thailand? Kalau durian? Indonesia banget Kenapa jadi Thailand?

Demikian Pak. Jadi perlu kerja sama dengan Kementerian Perikanan, Kementerian Perdagangan, atau lembaga lain. Bila perlu juga datangkan investor-investor. Bangsa Indonesia sendiri juga banyak Pak, enggak usah dari luar negeri. Kalau ada maunya, berikan kesempatan.

Terima kasih.

Assalamualaikum.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Asep Maoshul terima kasih.

Berikutnya Pak Krisantus dari Kalbar.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Perkenalkan anggota Komisi IV.

Bapak-bapak Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata

Ini mau saya patenkan jadi salam Komisi IV. Harus, harus, harus, Pak jawabnya Pak. Karena sering rapat dengan Komisi IV. Mesti bisa menjawab *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*

Baik, saya Krisantus Kurniawan dari Dapil 2. Sekarang sudah ada 2 Dapil di Kalimantan Barat tapi dulunya 1 Dapil dan sebelum di DPR RI ini saya di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan memang tinggal di lahan gambut. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa luasan lahan gambut di Kalimantan Barat cukup luas bahkan sangat luas di Republik Indonesia ini.

Saya ada beberapa pertanyaan Pak, dulu sebelum teknologi kita begitu maju kemudian pemerintahan juga belum seperti saat ini program-program Pemerintah juga belum merata dan menyebar ke seluruh pelosok. Kita jarang mendengar bahwa terjadi kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran lahan gambut. Tetapi justru pada saat ini dengan begitu banyaknya program kegiatan yang kita konsentrasikan di lahan gambut, justru setiap tahun terjadi kabut asap yang diakibatkan dominan oleh kebakaran lahan gambut. Nah saya pikir dan saya menyarankan juga pada kesempatan ini alangkah lebih baiknya tentu program-program yang Bapak-bapak buat di lahan gambut, kita konsentrasi ikan di titik penyebab dari kebakaran itu.

Nah kalau kita sudah tahu penyebabnya misalnya ada yang kalau di Pontianak itu, itu kan lidah buaya yang biasa ditanam di lahan gambut, kemudian nanas itu biasanya terjadi pembakaran pembakaran-pembakaran di lahan itu. Mungkin itu salah satu pemicu. Kenapa kita tidak konsentrasi kan programnya dititik kegiatan ekonomi rakyat itu? Kemudian yang berikutnya saya mau tahu. Tadi Bapak sudah memaparkan para Direktur Jenderal sudah

mapan sesuai dengan bidang dan tugas pokok masing-masing, program-program yang terkonsentrasi di lahan gambut. Saya mohon dijawab seberapa efektif program-program yang Bapak buat di lahan gambut itu bisa setidaknya tidaknya sekian persen mengurangi kebakaran yang terjadi di lahan gambut.

Kemudian berikutnya agar kami bisa berhitung Pak, berhitung. Nantinya mungkin bisa diberikan kepada kami, seberapa jauh, seberapa banyak total anggaran yang terkonsentrasi di lahan gambut dalam rangka mengantisipasi terutama kabut asap. Karena kami Komisi IV beberapa waktu lalu sudah ke Sintang Pak. Ini kan saling tuding bahwa kebakaran itu diakibatkan kabut asap yang begitu tebal diakibatkan oleh ladang berpindah-pindah. Hal ini membuat kemarahan kelompok masyarakat tertentu.

Tetapi pada kenyataannya menurut saya dan karena saya tinggal di sana memang kabut asap di Provinsi Kalimantan Barat dominan diakibatkan oleh kebakaran di lahan gambut yang memang sulit dipadamkan. Kan Musi Rawas mungkin kita setiap tahun selalu kegiatannya ini Pak. Nanti ke depan mungkin kita punya progres untuk membuat satu program yang tidak lagi di lahan gambut alangkah lebih baiknya di bidang kemasyarakatan.

Jadi saya pikir begitu Pimpinan. Ada 4 pertanyaan, saya mohon jawaban dari Bapak-bapak sekalian.

Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Krisantus.

Jadi banyak pertanyaan mohon nanti Bapak Dirjen, Pak kepala BRG di jawab satu persatu.

Kemudian selanjutnya Bu Nur'aeni kami persilahkan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pak Wakil Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pak Dirjen, Pak Kepala BRG serta perwakilan dari daerah-daerah dan teman-teman Komisi IV.

Pertama, tentu mengapresiasi apa yang tadi telah dipaparkan luar biasa dari konsepsi serta perencanaan ke depan ini cukup bagus saya kira tapi yang terpenting menurut saya bahwa konsepsi dan perencanaan ini bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Intinya walaupun saya bukan perwakilan dari daerah wilayah sana, saya dari Banten tapi karena memiliki kepedulian dan

perhatian terhadap Karhutla khususnya pengolahan lahan gambut makanya ikut untuk bisa memberikan masukan dan saran.

Dan pada hari ini tentu ini akan dilakukan evaluasi sebagai bentuk perbaikan nanti di masa yang akan datang. Tadi paparan yang disampaikan bahwa lahan BRG ini cukup strategi yang memiliki fungsi yaitu menjaga keseimbangan hidrologi dalam area kawasan hidrologi gambut. Dan peranan BRG juga saya kira cukup penting yaitu sebagai fungsi koordinatif di antara Kementerian yang lainnya seperti PUPR, dan Pertanian serta yang lainnya untuk bisa meningkatkan sinergi program integrasi yang menyeluruh terhadap penyelesaian Karhutla di wilayah daerah di Indonesia.

Dan saya berharap banyak apa yang tadi dipaparkan memang harus memenuhi unsur-unsur yang lain. Mungkin yang belum dipaparkan yang belum saya dengar yaitu kaitan dengan sudahkah neraca air yang berbasis dan ini dilakukannya ataupun dilakukan suatu bentuk berapa sih neraca air yang berbasis *landscape* ini yang dilakukan ya, ataupun dilakukan suatu bentuk berapa sih neraca air yang berbasis *landscape* ini yang dihasilkan? Ya untuk mengukur kira-kira dari posisi lahan gambut ini, dari sisi kebasahan dan sebagainya akan berpengaruh cukup besar.

Yang berikutnya saya lihat dari sisi anggaran evaluasi. Saya ingin bertanya kepada BRG dari anggaran yang saya kira walaupun kita lihat masih minim ya tapi kalau dari sisi realisasi juga masih rendah. Kan kita ingin yakin dong apa sih mitra kita ini khusus BRG dan Dirjen Perusakan Gambut untuk bisa meyakinkan ke kami ini untuk bisa *supporting*, mendorong sesuai dengan fungsi kami. Baik sisi regulasi maupun fungsi anggaran.

Kalau dari sisi anggaran kalau merencanakannya yang terlalu tidak terukur dan terlalu tidak realistis tentu juga kan akan mengakibatkan anggaran-anggaran yang cukup besar tapi tidak mampu untuk menjalankan. Ya terbukti yang saat ini disodorkan saja kepada kami, hanya mampu dilaksanakan kurang lebih 63%. Saya ingin tanyakan efektivitas waktu sampai dengan Desember ini apakah akan sanggup untuk bisa direalisasikan? yang pertama.

Yang kedua untuk Dirjen Pengendalian Kerusakan Gambut ini anggaran yang ada sekitar 12 miliar-an ya? Di sini saya lihat bahwa ada anggaran HLN, apakah Hubungan Luar Negeri bukan ya? ini cukup besar. Yang ingin saya tanyakan dari beberapa anggaran jika di *mix* antara APBN, HLN, serta yang lain, daerah, kira-kira berapa persen sih yang sudah dilakukan untuk bisa mencegah Karhutla? tapi kenapa terjadi tiap tahun terus- menerus? berarti apa di sini? berarti harus ada cara-cara penyelesaian itu yang dibedakan antara wilayah yang lain. Waktu itu saya mencoba lihat bahwa di Kalimantan itu terdapat kerusakan lahan itu memang dari orang perusahaan ya yaitu penanaman modal asing dan PMD rata-rata. Tapi berbeda dengan Sumatera Selatan yang kebanyakannya adalah lahan perorangan.

Menurut saya untuk wilayah-wilayah kerusakan lahan yang memang dilakukan oleh pihak-pihak swasta tentunya ini yang harus segera di *cut* dalam

bentuk apa? mungkin izin yang tidak dimudahkan. Yang kedua bagaimana dari sisi penegakan hukum, ini juga harus tegas dan harus ditegakkan. Berbeda di saat penyelesaian itu disebabkan oleh masyarakat. Berarti apa? mungkin nilai edukasi, sosialisasi, yang belum dilakukan upaya-upaya ke sana. Saya lebih mendorong lebih setuju bagaimana nanti ke depan program-program tadi mengenai pengendalian lahan gambut ini lebih kepada sisi nilai ekonomis yang melibatkan masyarakat sekitar yang ada di wilayah gambut, agar lebih apa? merasakan kesejahteraan dan yang lebih besarnya lagi bisa mengendalikan tadi, kebakaran-kebakaran hutan dan lahan baik itu milik PMA PMDN maupun milik masyarakat itu sendiri.

Terima kasih Pak Wakil.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Nur'aeni, selanjutnya Bu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Pak Dirjen, Pak Kepala Badan Restorasi Gambut, dan
Teman-teman anggota dewan yang cintai.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Menyimak tadi presentasi Bapak dan kemudian *input* dari teman-teman, saya juga ingin menyikapi Pak bagaimana mengelola lahan gambut ini dengan baik karena tadi Bapak ungkapkan bahwa Badan Restorasi Gambut tidak punya kaki di daerah. Jadi saya sarankan Pak kerja sama yang baik dengan daerah itu perlu ditingkatkan karena kebetulan Pak saya pernah membangun Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah gambut di Kalimantan Timur, Tengah, dan Kalimantan Barat, Kebetulan saya juga mengikuti Pak Kris ini ke Kalimantan Barat. Di sana *problem* nya Pak bahwa pangan di sana sangat kurang. Tadi dikemukakan oleh Pak Asep bahwa bisa saja talas tadi bisa menggantikan padi.

Mungkin Bapak bisa bersinergi dengan balai-balai penelitian, tidak hanya di bawah Kementerian LHK tapi di bawah Kementerian lain Pak. Karena hasil-hasil penelitian itu sudah banyak tapi teknologinya tidak bisa diaplikasikan karena tidak ada dana sosialisasi. Di lain pihak anggaran Bapak ini belum dimanfaatkan dengan baik. Nah itu harus ada *benchmark analysis* juga Pak. Jadi sebelum BRG melakukan sebaiknya ada analisis data kemudian setelah BRG melakukan juga hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat itu bagaimana? karena ini penting Pak, penting nya supaya kami di Komisi IV cara membuat atau mendorong anggaran Bapak untuk lebih terfokus lagi.

Yang kedua dengan Badan ESDM Pak. Jadi saya kira tadi selain hasil-hasil pangan yang sudah dikelola bagus sekali. Tapi apakah sudah ada penelitian-penelitian yang kerja sama dengan Badan ESDM ataupun

perusahaan untuk membuat energi alternatif? Tadi pupuk sudah dikemukakan padahal kita di Komisi IV ini juga mendorong subsidi pupuk yang sangat tinggi yang tidak kena sasaran. Nah alangkah baiknya kalau ada koordinasi dengan beberapa Kementerian sehingga gambut ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan nilai ekonomisnya. Ini memang tidak mudah Pak tapi kami ingin mendorong ke sana untuk Bapak bisa berkoordinasi si dengan Badan-badan Litbang yang ada di beberapa Kementerian.

Kemudian ini Pak ada salah satu mungkin ini tidak ada kaitannya dengan gambut. Kebutuhan Dapil saya di kota Bogor baru saja saya dapat WA ini dari salah satu konstituen bahwa di daerah Paledang Pak ada beberapa rumah yang terhanyut. Mohon bisa ditindaklanjuti oleh Pak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup karena di sana sudah sangat parah. Beberapa rumah sudah hancur.

Terima kasih Pak.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Endang.

Selanjutnya Bu Wulan. Bu Wulan sudah tidak ada. Pak Darori kami persilakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

Ketua, teman-teman sekalian, Pak Dirjen.

Saya ini akan meneruskan banyak pertanyaan dari grup, saya baru baca dari grup rimbawan senior, rimbawan nusantara, rimbawan peduli hutan ya. Jadi begini, karena bertanya kepada saya, saya enggak bisa jawab. Tapi ya sebenarnya tahu tapi kurang tepat bahwa kita filosofi orang Kehutanan atau LHK ini ke mana sebetulnya? Kalau yang benar menurut teman-teman ini, kita kan tugasnya adalah melestarikan hutan, tanah, dan air. Melestarikan hutan, tanah, dan air. Tapi faktanya kita sudah lari lebih condong ke kepentingan rakyat bahkan seperti kemarin Perhutani, Inhutani itu lari kegiatannya. menanam kopi, menanam jagung, ketela, ubi, itu saya enggak mengerti mau ke mana ini Kehutanan itu? Jadi saya bingung mau menjawab begitu ya.

Maka saya sarankan kepada teman-teman cobalah kita ini kembali ke itu tugas kita kan melestarikan hutan dan mencegah kebakaran dan bahaya banjir dan longsor itu kuncinya. Tapi ini para senior, teman-teman saya ini mengkritiknya ke saya "Apa tugas Darori di DPR? sama saja". Katanya. Waduh iya saya sama seperti *sampean* bisanya ngomong tapi enggak bisa berbuat. Saya bilang begitu kadang-kadang. Jadi teman-teman ini yang perlu kami

sampaikan kemarin di Inhutani, Perhutani itu untung 4 miliar, rugi biaya operasionalnya 6 miliar. Kaya begitu kok BUMN itu?

Kalau memang kita akan melestarikan hutan, kasih lah Perum perusahaan Inhutani seperti yang pernah kita miliki penugasan. Kemarin kesimpulan kita akan meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian LHK memberi penugasan untuk merehabilitasi, revisi, dan pengajuan. Tolong dikasih anggaran minimal 2 triliun tiap tahun. Ini sudah masuk kesimpulan kemarin begitu. Nah BRG tadi 140 miliar ya? Dengan tugas 2 juta hektar. Kalau 140 miliar itu untuk menanam itu hanya 5 ribu hektar. Jadi jangan terlalu mengharap teman-teman mempersalahkan BRG ini apa? kok masih kebakaran? tadi saya dengar. Ini kurang pas begitu. Anggaran 140 miliar hanya untuk 5 ribu hektar, tugasnya 2 juta hektar, itu berapa puluh tahun akan selesai? kalau mau seperti kemarin tadi pagi Pak Ketua menyarankan anggarannya ditingkatkan. Penugasannya jelas, 6 pohon dan sebagainya.

Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini saya baru baca orientasinya kok tidak *ketapak* begitu ya. Undang-undang 41 itu jelas '99 itu di sana membagi hutan itu 3. Konservasi, lindung dan produksi. Kriterianya apa? kalau produksi itu kan berdasarkan kelerengan, curah hujan, dan kepekaan tanah. Jadi kadang-kadang ada teman yang menanyakan enggak ada hutannya kok jadi kehutanan? Memang kalau enggak ada hutannya di reboisasi. Kalau kawasan terjadi kebakaran, dihijaukan begitu. Dengan kriteria itu dibentuk, diberikan izin baik HPH, HTI dan kebun. Tadi Pak Dirjen mengatakan ada 12 juta hektar yang gambut lindung itu bahkan Undang-undang 32. Sehingga banyak perusahaan yang sekarang dicabut. Itu mau di kembalikan yang sekarang dicabut?

Ini jangan terulang kembali *open access* HPH, di *open access* kan akhirnya ditambah jadi kebun, dibakar. Saya khawatir dengan *open access* nya sekarang ini yang dicabut dianggap oleh masyarakat *open access*, dibuka lah untuk kebun rakyat hingga terjadi kebakaran karena rakyat ingin yang murah. Ini sudah ada jalan keluarnya ini.

Terus perhutanan sosial Pak Bambang, ini kadang-kadang kita ini menabrak Undang-undang begitu. Tadi saya dengar ada kawasan hutan yang sudah diduduki dijadikan TORA. Undang-undang 41 Pasal 50 mengatakan "Setiap orang yang merusak kawasan hutan tanpa izin dikenakan pidana." Mestinya Undang-undang nya diubah dulu. Ini perlu ya jangan sampai teman-teman kita kemudian hari bermasalah. Bahkan ini ada laporan di Ditjen Perkebunan, korporasi kebun yang sudah melanggar Undang-undang diputihkan oleh Kementerian LHK 800 ribu hektar.

Ini Pak Ditjenbun, Bapak Ketua yang menyampaikan kemarin. Saya bingung. Dan ini sudah di KPK datanya ini. Jadi tolong jangan sampai nanti kita mau berbuat baik karena takut perintah, tapi kita akan korban. Saya enggak mau teman-teman korban, begitu. Jadi ke depan saya kira ini Pak Ketua Kehutanan ini kan tugasnya untuk menjaga hutan, banjir, longsor, dan kekeringan. Saya kira marwahnya dikembalikan lagi lah. Karena ada yang

menanya ini, yang agak enggak enak. Berapa batang uang yang ditanam oleh Kehutanan sekarang? Saya jadi enggak bisa jawab programnya.

Pak Bambang, kemarin Perum 300 ribu hektar Perum Perhutani dijadikan hutan sosial, bermasalah. Semalam Pak Ketua ya, rapatnya? Mengeluh itu, jadi tolong koordinasikan kan lah jangan sampai keluar seperti ini, begitu. Saran kita seperti saran Presiden, cobalah ke depannya perhutanan sosial, TORA ini mau diapakan? anggarannya dari mana? kalau memang mau di tanam di tanah yang produktif, punya konservasi, tanam buah-buahan dan sebagainya, laksanakan saja. Tapi TORA juga saya tanyakan agak kurang pas, kenapa TORA ini yang sudah diduduki pakai sertifikat? Sekarang sudah dijual lagi Pak.

Ini saya berulang waktu saya Kepala Kehutanan di Kabupaten. Saudara transmigrasi pulang ke kampung ke Kebumen tanahnya dijual ke saya, dan itu sertifikat. Ini yang mungkin akan terulang lagi, mungkin beberapa tahun ke depan. Tolong di evaluasi lah, jangan kesalahan yang lalu diulangi lagi begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya mengumpulkan banyak sekali. Jadi tolong perhutanan sosial di Jawa, di Perum Perhutani coba tanam misalkan manggis 200 hektar. 60% untuk rakyat 40% untuk Perum. Itu menghasilkan tambahan yang punya nilai konservasi dan satwanya juga hidup di daerah situ.

Karena kemarin tanyakan ke Perum, perhutanan sosial tindak lanjutnya dikasih biaya apa? enggak ada. Rakyat ini miskin, Pak Bambang tolonglah, dianggarkan, diajukan ke Ketua, berapa untuk memberi bibit kepada masyarakat, biayanya untuk menanam berapa? Saya kira Komisi IV akan mendukung program ini, enggak ada masalah. 2 tahun yang lalu Pak Komisi IV mau menambahkan 2 triliun ditolak itu. Saya kira enggak sulit itu. Karena ini untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan Komisi IV saja.

Sekian dan terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terakhir Pak Surnarna. Kami persilakan Pak.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Dirjen, Bapak Direktur yang saya hormati.

Sedikit saja, bahwa saya dari Dapil Banyumas Cilacap. Di tempat saya tidak ada lahan gambut Pak, tidak perlu dijelaskan Pak Darori sudah hafal. Iya, jadi saya melihat di sini bahwa terkait dengan konsep-konsep masalah fungsi hidrologi, juga vegetasi adalah konsep pemulihan ekosistem gambut. Tapi tadi banyak saya disampaikan tapi tidak melihat berapa sih besaran anggaran yang

diharapkan? Karena untuk pencapaian konsep pemulihan ekosistem gambut itu sendiri.

Apakah kita dalam durasi tiap tahun terus menurunkan ke anak turun kita masih akan ada kebakaran gambut terus-menerus. Tentu ini juga akan melelahkan. Apabila ada langkah-langkah ini, langkah-langkah konsep ini semua kira-kira dalam durasi 5 tahun itu berapa besar sih yang bisa kita selesaikan? Berapa besar sih target kita? kalau sudah disampaikan harus anggaran sedikit, harus anggaran seberapa besar tiap tahunnya untuk menyelesaikan permasalahan lahan gambut ini? seperti kita lihat bahwa kami sampaikan beberapa komoditas yang dapat dikembangkan.

Saya pikir bahwa banyak pasti yang mau investasi karena memang di sini juga ada bisa cocok untuk nanas, untuk buah naga, untuk kopi, tentu perusahaan-perusahaan negara juga banyak. Di samping itu perusahaan-perusahaan swasta juga banyak, bagaimana mereka bisa dikerja samakan, Investasi? Terus berapa besar yang harus diselesaikan? dan berapa besar harus dianggarkan secara langsung? ya kerja sama dengan masyarakat.

Selanjutnya bahwa lahan gambut banyak relawan-relawan di beberapa desa. Berapa sifat yang kita berikan untuk beberapa desa ini apabila nantinya bisa menangani lahan gambut ini? apakah mereka perlu dibantu berikan bantuan per desanya apabila mereka memang bisa menghindari dan juga bisa menangani lahan gambut. Apakah per desa 500 juta tambahannya, atau satu miliar *reward* mereka. Sehingga mereka punya keinginan, punya harapan besar juga terkait juga untuk pembangunan di desa nya. Bukan hanya kita mengharap desa itu ada pelatihan-pelatihan terus tapi tidak ada *reward* nya apa-apa.

Desa yang bisa menangani dan desa yang tidak menangani sama saja, tidak ada nilai tambahannya untuk desa-desa yang bisa sukses menanam lahan gambut maupun kebakaran ini. Itu Bapak yang kami sampaikan, kalau memang ada peternakan kenapa kita tidak gandeng semuanya, jadi penanganan ini secara bersamaan, bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa sama-sama saja tentu kita kan sulit sendiri dari segi penanganan ini. Apalagi sudah disampaikan bahwa anggarannya begitu kecil, tentu Pak Direktur hanya pusing saja. Kalau anggarannya juga mepet, targetnya juga ditarget apa? Tentu juga sangat sulit.

Terima kasih Pak Ketua, dan juga Pak Dirjen juga Pak Direktur. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dirjen KLHK serta Kepala BRG untuk menyampaikan jawabannya, tapi usulan saya nanti kalau jawabannya belum makan siang pasti agak *mencong-mencong* dikit saya usulkan kita *break* 30 menit makan siang, ishoma. jam 13.45 kita lanjutkan. Jadi Bapak-bapak yang dari provinsi enggak usah makan keluar, di sini ada disiapkan makan gratis ya. Kita *break* dulu 30 menit.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

(rekaman terpotong) Kami sudah memiliki sekarang peta tingkat kelembaban lahan gambut, Bapak/Ibu setiap 2 minggu sekali di *update*. Kita tampilkan. Jadi kelihatan mana yang basah, mana yang tidak. Maka seharusnya waktu kami beberapa kali ketemu dengan Pak Gubernur, Pak Bupati dengan peta ini yang persis yang putih itu yang harus diamankan. Karena itu diakibatkan kekeringan yang tinggi. Artinya tidak lagi kita sudah kita basahi begitu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi kami laporkan. Kami punya data lengkap *series* untuk pengawasan data *logger* dari tinggi muka air tanah yang terjaga 0,4 meter. Kemudian yang ketiga, kita juga menggunakan data *Air Quality System* (AQS) itu kalau partikelnya sudah di atas kami juga selalu informasikan, artinya pasti ada pusat-pusat kebakaran di sekitar areal wilayah tersebut.

Kemudian tadi dari Pak, apabila efektif yang kami lakukan dalam tayangan Bapak/Ibu anggota yang terhormat, Pimpinan. Itu adalah yang garis-garis kuning itu adalah daerah-daerah yang kami intervensi melalui pembuatan pembangunan sekat kanal segala macam. Dan *alhamdulillah* pantauan kami Karhutla kemarin tidak terjadi di daerah itu. Jadi artinya cukup efektif yang merah-merah itu yang terjadi, semuanya di luar yang sudah diintervensi.

Kemudian Bapak/Ibu yang terhormat kami juga ingin melaporkan tadi saya sampaikan sampai hari ini sampai 24, kami mungkin baru bisa memetakan HKG dengan skala 1 banding 50.000 itu sekitar 300 an Bapak Pimpinan. Jumlahnya 865.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Berarti belum 50% ya Bapak?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Belum Bapak, padahal ini penting buat kami adalah untuk menentukan mana yang lindung, mana yang budidaya.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bagaimana untuk percepatannya?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Nah ini kami mohon dukungan Bapak Pimpinan dan anggota dewan. 1 itu rata-rata 1 miliar Bapak Pimpinan. Jadi kami butuh 500 KHG.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi Bapak tahun 2020 dapat dana berapa?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Tahun 2020 kami hanya dapat 19 miliar.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Cuma 19 miliar? Sampai kiamat enggak akan selesai urusannya.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.

Kemudian terkait dengan ini juga, tadi pertanyaan dari Bu Nur'aeni. Neraca air. Kalau kami sudah punya 1:20.000 KHG lengkap, kami bisa hitung neraca airnya. Ini sudah kami lakukan di (suara tidak jelas) salah satunya di Pulau Rupa, lengkap. Nah ini juga menjawab pertanyaan Pak Darori. Di situ sudah ditentukan pertapak. Jadi mana yang KPH, mana yang konsesi, mana yang Pemerintah Daerah, mana yang ini sudah kami bagi rata tanggung jawab pengelolaannya, begitu. Tapi lagi-lagi kami dibatasi oleh peta yang 1:20.000 ini, begitu.

Kemudian untuk pemulihan Pak Krisantus. Kami dilaporkan tadi untuk urusan sudah ada (suara tidak jelas) perusahaan, ter basahi 3,26 juta. Kemudian masyarakat yang kami di luar dari (suara tidak jelas) BRG ada sekitar 9.500 hektar. Nah tadi dibuktikan di sini baik yang masyarakat maupun yang perusahaan yang sudah kita dekati tidak terjadi kebakaran, *alhamdulillah*.

Kemudian untuk yang terhormat Pak Darori, izin yang sudah diberikan Bapak, tetap berlaku sampai masa izinnya berakhir. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang telah menerima itu baik itu HTI maupun perkebunan sawit mereka tetap melaksanakan. Kalau yang di budidaya tidak masalah, tetapi di lindung yang kami tawar hanya satu Pak, kalau di situ ada puncak kubah gambut, kami minta untuk dipertahankan. Apalagi tandon air nya. Tapi yang lainnya silakan tetap juga dengan menjaga ingin tinggi air tanah tetap 0,4 meter begitu. Terkait dengan itu juga dengan ibu Nur'aeni, tidak ada lagi yang baru. Jadi sejak PP 31 kemudian 37 tidak ada izin baru untuk di lahan gambut.

Yang terakhir Bapak/Ibu, kami ingin memberikan tanggapan kepada untuk kerusakan Taman Nasional Kerinci Seblat ini nanti akan kami sampaikan dengan teman Direktorat Jenderal KSDAE karena itu kita berbagi tugas konservasi diri mereka tapi untuk tambangnya kami akan kami melakukan. Terakhir dari Pak Krisantus, kenapa berulang terbakar? kami mohon maaf Bapak/Ibu, hancurnya gambut itu luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BRG, itu lah yang kanal-kanal itu memotong kontur Pak Pimpinan. Jadi air itu menggelontor ke sungai sampai ke laut begitu.

Itulah, iya betul. Itulah sekarang itu kita benahi membuat sekat-sekatnya supaya air tetap ada, di samping mengalihkan yang sudah terlanjur terpotong kontur itu kita coba ubah, perbaiki begitu. Jadi mudah-mudahan mungkin 3 tahun, 4 tahun ke depan baru bisa aman dari Karhutla. Karena terlalu kering.

Demikian Pak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Dirjen, kalau kata saya 3-4 tahun lalu pencegahannya kalau dengan biaya, ongkos sekian. Cuma sekian ratus miliar. Rasanya mustahil. Saya pesimis untuk itu seharusnya kan dalam beberapa kali Rapat Kerja, saya sudah bicara dengan Ibu Menteri tolong dianggarkan sebesar mungkin untuk pencegahannya. Jangan sampai sudah terjadi kebakaran baru berpikir cari pemadam kebakaran, beli selang, cari air, dan lain-lain. Kenapa tidak sebelumnya saja?

Seperti tadi Pak Dirjen mengatakan anggarannya cuma 19 miliar. Saya rasa dikasih 190 miliar juga masih kecil karena ini untuk kepentingan deteksi awal. Ya nanti mudah-mudahan 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan lebih besar lagi dan saya juga minta sama anggota-anggota saya yang kebetulan di Badan Anggaran untuk mengawal.

Silakan Pak Dirjen.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

ya, silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Saya ingin mengingatkan Pak Dirjen bahwa saya lihat peta hampir 80% ini kebakaran di luar kawasan hutan. Akhirnya ditanam masyarakat perkebunan. Nah Pak Sudin, Pak Ketua sudah membuat surat ke Pimpinan DPR agar segera dibuat Undang-undang Kebakaran Hutan dan Lahan. Ini berarti kan di Kementerian Pertanian sebenarnya dominan. Tapi selama ini seolah-olah Kementerian Pertanian tidak ada apa-apa seolah-olah semuanya KLHK bisa meminta proaktif bersama-sama dengan Kementerian Pertanian segera dirapatkan sehingga tidak sinkron dengan Komisi IV. Undang-undang untuk tahun ini bisa terealisasi.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi kemarin waktu kunjungan kita ke Jambi, itu saya membawa Dirjen Perkebunan. Nanti pun kalau ada Rapat Gabungan tetap saya undang jadi jangan LHK selalu jadi kambing hitam sedangkan lokasi kebakarannya belum tentu di lokasi hutan. Kita hampir tahu, hampir sebagian besar ada di lokasi kebun mungkin kalau HTI itu domainnya LHK, tapi kalau di lokasi kebun kan Dirjen Perkebunan. Itu pun harus turut memantau. Misalnya masyarakat tidak boleh membakar tapi kan harus ada solusinya. Apa solusinya?

Silakan Mbak.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Dari saya sebentar Pak Ketua. Saya melihat ada anggaran HLN ya. Itu bisa di jelaskan seperti apa?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Pak Pimpinan?

Terima kasih Bu Nur.

Jadi kami tahun ini dapat hibah luar negeri dari IFAT. IFAT itu dari FAO tapi baru setelah *discuss* segala macam baru kontaknya itu Oktober kemarin Ibu, Oktober kemarin. Jadi baru 2 bulan. Nah ini, ini kami buat untuk pemetaan, kemudian untuk membuat sistem yang tadi itu jadi instalasi Desember ini selesai tapi itu baru dapat sekitar 15 m. Karena kita tidak sanggup, waktunya mepet, diminta dikasih 31, kita hanya sanggup 50% nya.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Izin, mungkin pesan saya begini, jangan sampai dobel program ya. Apa yang sudah diberikan hubungan kerja sama luar negeri dengan APBN ini yang harus dipisahkan. Jadi modelnya integrasi saja. Yang sudah diberikan program lewat luar negeri kerja sama tadi, yang APBN membiayai untuk program kegiatan yang lainnya.

Terima kasih.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Siap Ibu. Jadi kami fokuskan pada pemenuhan yang peta 1:20.000 itu karena masih banyak sekali yang mau diselesaikan.

Terima kasih.

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan dan anggota yang saya hormati.

Untuk Pak Sudin, saya terima kasih atas arahannya dan untuk pemberian akses legal di Lampung dan pada intinya kami akan lebih hati-hati. Tetapi catatannya adalah sebelum tahun 2014. Izin HKM itu diberikan melalui Bupati Pak, setelah 2014 oleh KLHK. Dasarnya adalah usulan ada subjeknya yaitu kelompok masyarakat yang bisa dibuktikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan areal atau objek nya yang dimohonkan. Setelah mendapatkan izin itu tadi pendampingan melalui pendampingan penyuluh dari provinsi dan pada saat ini kita baru 1.219 sementara lokasinya sudah 6.112 Pak. Jadi 1 penyuluh itu memegang 4 sampai dengan 5.

Dan harapannya ke depan ini juga bisa ditambah penyuluh-penyuluhnya sehingga cita-cita untuk memberikan akses kepada masyarakat itu mewujudkan kesejahteraan dan manfaat hutannya untuk yang lebih baik.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Dirjen saya menjelaskan sedikit. Kalau penyuluhnya itu dari provinsi, terus mereka memberikan penyuluhan ke, enggak usah bilang jauh lah mungkin kalau di Kalimantan Tengah dari ujung ke ujung bisa 20 jam. Dari ibukota provinsi di Lampung ke Lampung Barat itu paling cepat paling cepat 7 jam naik mobil, sekarang yang kita pikirkan apabila penyuluh fasilitasnya cukup? apabila Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah cukup dananya?

Nah ini yang kita pikirkan lagi, jadi pengawasannya kita memberikan sesuatu tetapi pengawasannya kurang efektif. Saya khawatir berpindah tangan. Berpindah tangan, nanti di suatu tempat yang bisa bikin KTP lagi. Karena umumnya di daerah-daerah terpencil begitu kan KTP enggak semua punya e-KTP, masih banyak yang pakai suket. Ya Pak Dirjen ya? Tolong lain waktu pengawasannya lebih tertib lagi lah. Lanjutkan.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.

Kemudian yang kedua dari Pak Krisantus Kurniawan dari Kalimantan Barat Pak. Data kami bahwa dampak perubahan sosial terhadap kebakaran hutan dulunya kalau kawasannya dikelola dan dijaga tentunya akan lebih rendah tingkat kebakarannya karena kemanfaatan tersebut. Oleh karena itu potret yang ingin kami sampaikan bahwa di Kalimantan Barat itu sudah ada 406.000 hektar perhutanan sosial di 171 lokasi di 12 kabupaten. Dan ada 6 Kabupaten yang sudah ada penetapan hutan adatnya oleh yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan sisanya dalam bentuk hutan desa, kemudian kemasyarakatan dan kemitraan Pak. Kemitraan antara hutan konservasi dengan masyarakat tidak dimungkinkan sekarang, kemudian HPH dengan masyarakat juga tidak dimungkinkan, HTI juga demikian. Jadi itu tidak dimungkinkan.

Kemudian Pak Darori, Pak Dirjen. Ini Pak Dirjen saya Pimpinan. Jadi saya agak takut. Baik, saya akan menyampaikan nilai filosofi ke mana arah pembangunan kehutanan. Jadi mohon izin Pak, kalau kita *review* berdasarkan RPJMN tahun 2015-2016 bahwa ada ketimpangan akses pemanfaatan di hutan produksi antara masyarakat dan korporasi. Data dari LHK itu mengatakan dari 43 juta hektar 42,5 juta hektar itu luas korporasi Pak. Sedangkan 0,4 yaitu oleh rakyat. Sehingga Pemerintah berkeinginan itu paling tidak 12,7 jadi 10% dari Total luas kawasan hutan itu bisa dikelola oleh rakyat atau 30% dari pemanfaatan hutan tadi.

Nah yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita ingin memastikan bahwa rakyat itu bisa mengelola hutan? ketika rakyat sudah mendapatkan legal akses dalam bentuk izin, kata kunci adalah pendampingan.

Karena masyarakat itu ada keterbatasan-keterbatasan mengenai sumber dayanya, pengetahuannya, kemudian juga penentuan lokalnya bagus tetapi pengetahuan untuk usahanya masih terbatas. Sehingga memerlukan pendampingan. Nah ketika itu melakukan pendampingan, ada tiga hal yang dikerjakan dan sudah diatur dalam Permen LHK.

Yang pertama adalah mengenai kelembagaan, kelembagaan ini kelompok tani kalau bisa ujungnya itu ada badan hukum seperti koperasi atau Bumdes Pak. Oleh karena itu kita kerja sama dengan Kementerian Desa, kemudian dengan Pak Teten Koperasi dan UKM juga sudah mulai bekerja. *bio reference* nya hutan sosial yang dipakai juga untuk teman-teman di sana tadi akan lebih bagus kalau kita keroyok sama-sama.

Kemudian yang kedua adalah menetapkan pola hutannya. Ini yang paling penting bahwa masyarakat juga diminta membuat rencana mengenai HKM nya tadi. Kan pendekatannya lanskap, jadi ada areal untuk perlindungannya kaya sumber mata air, atau lereng yang terjal, itu dikategorikan menjadi areal untuk perlindungan. Sedangkan yang sisanya dengan pola *agroforestry*, *silvofishery*, sama *silvopastura*. Jadi hutannya masih ada tapi kombinasi dengan pangan, kombinasi dengan ikan, kombinasi dengan ternak.

Kemudian yang ketiga Pak sebetulnya benar tadi, saran Pak Darori sudah kita coba kerjakan Pak dalam bentuk *cluster*. Jadi ketika HKM itu ingin mengembangkan pilihan komoditi untuk kehutanan dan pertanian nya kalau bisa *clusternya* jangan banyak-banyak supaya dia punya apa *scale of economy*, skala ekonomi yang madani begitu ya. Syukur-syukur kalau dia produktivitas yang bagus juga bisa didorong dengan membangun industri berskala masyarakat di tingkat tapak. Ini yang sedang kita coba kembangkan Pak dengan koperasi dan UKM dan IKM.

Oleh karena itu harapannya ke depan dengan perhutanan sosial itu rakyatnya karena sudah dipercaya oleh masyarakat, kemudian dengan instrumen pengelolaan yang baik begitu ya. Dan dia badan hukum yang setara dengan populasi bisa membangun sebuah kerja sama. Kerja sama di dalam bidang produktivitas dan juga kerja sama dalam permodalan dan juga untuk pasar Pak. Nah insentif yang diberikan dengan adanya SK perhutanan sosial Pak, karena ini program nasional dan merupakan kegiatan prioritas.

Dengan adanya RKU yang dengan *cluster* komoditas tadi sebetulnya program dari Kementerian lain sudah bisa masuk Pak. Misalnya contoh, bibit dari kehutanan, dari BPDAS. Jadi kebun bibit itu sudah sekarang dikelola oleh kelompok masyarakat dari perhutanan sosial. Kemudian yang kedua disahkan ada pupuk bersubsidi itu juga bisa dengan RKU tadi. Bibit yang berkualitas itu juga bisa, termasuk untuk..

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya ingin menanyakan kalau pupuk bagaimana caranya? kalau dia tidak masuk dalam kalau tidak masuk dalam CPCL? Kalau tidak masuk dalam LDK kan enggak bisa.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Ya harus dimasukkan Pak.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Masukannya bagaimana? Orang yang sekarang saja tidak cukup Pak. Coba tanya teman-teman Dinas, cukup enggak yang sekarang saja paling tidak terpenuhi enggak sampai 70%. Nanti kendalanya kalau itu disampaikan kepada masyarakat, otomatis nanti masyarakatnya akan menuntut, iya kan?

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, izin Ketua.

Jadi Pak Bambang begini. Itu bagus ya, cuma kita kan rakyat miskin. Daripada kita mengandalkan orang lain, saya kira karena skala prioritas kita mengadakan kegiatan pola *blocked grant* saja. Areal yang diberikan 100 hektar, kasihlah 100 hektar kegiatan tanaman dan biaya tanaman yang bibitnya daripada menyandingkan dari Kementerian lain. Saya kira dianggarkan di Komisi IV akan dibahas akan didukung. Karena perhutanan sosial di Jawa sudah 300 ribu hektar.

Urutannya ditanya begini. Tanam apa? baru rencana Pak. Lah ini kan jadi karena sudah 300 dibagikan, bikin *blocked grant*. *Blocked grant* artinya uang kita langsung rekening rakyat bisa dicairkan setelah diverifikasi, hasilnya berita acara itu untuk mencairkan uang di bank. Tidak ada potong-potong, dari atas ke bawah itu bersih. Ini pengalaman kita kan, jadi kita aman enggak akan diperiksa Pak. Tolong ajukan saja Pak. Mungkin 2020 sudah lewat 2021 bikin saja, *blocked grant*. Bibitnya 1 meteran jadi langsung 4 tahun Menterinya bisa lihat hasilnya sudah berbuah. Contohnya rambutan saya, 4 tahun berbuah kan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Atau alternatifnya pakai dana CSR. Karena kita tahu dana CSR ini sebagian besar tidak jelas, *juntrungannya* ke mana, jatuhnya ke mana. Saya rasa kan untuk pembinaan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Ya Pak ya?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih Pak Darori atas sarannya nanti kita lakukan di 2021 dan sekaligus Pak, mohon dukungan untuk dekonnya juga Pak untuk Pokja-pokja yang di provinsi Pak. Ini sekaligus Pak supaya..

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi silakan saja diusulkan, jadi nanti saya juga akan bicara dengan Pimpinan Banggar, ini tolong dibantu karena ini sangat penting.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Baik terima kasih atas sarannya.

Dan yang terakhir Pak Darori terkait dengan kebijakan reforma agraria untuk TORA itu barangkali kita mengacu kepada Inpres Nomor 88 Tahun 2018 bahwa kampung-kampung yang sudah berada sebelum penetapan kawasan itu barangkali yang di legalkan keberadaannya melalui SHM.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Kalau penetapan kawasan dari mulai menunjukkan, pemetaan, sampai penetapan kan? Itu dari *judicial review* kita sudah kalah ya. Kehutanan harus sampai di penetapan. Area-area kawasan hutan karena kebijakannya baru itu kan sampai penataan, pemetaan, itu enggak mungkin Bupati enggak akan mau teken itu lah. Bupati kalau kepentingannya enggak diberikan, enggak akan memberikan. Itu sudah pengalaman kita.

Jadi yang tadi TORA ini di (suara tidak jelas) 100 ribu kawasan konservasi jadi TORA. Ini laporkan ke saya, "Pak ini saya ini anak buah Bapak sekarang sudah berubah kehutanan" waduh *tak takoke sik*, kan saya enggak mengerti. 100 ribu hektar kawasan konservasi jadi TORA, di sertifikatkan. Ini betul enggak, kalau enggak betul berarti laporan salah. Kalau betul, tolong diperbaiki. Pegawai yang di bawah ini tanya saya karena *handphone* saya masih terbuka, tanya terus. Jadi saya mau jawab kan takut salah. Saya kembalikan lagi ke teman-teman begitu ya. Tolong ini diingatkan jangan sampai salah, niatnya baik tapi jadi bisa masalah dikemudian hari.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Baik terima kasih Pak Darori.

Dan akan saya sampaikan kepada Direktur Jenderal PKPL Pak Sigit yang menangani masalah TORA.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Lanjut, Pak Kepala Badan.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Saya mulai menjawab beberapa pertanyaan Pak Krisantus. *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata* Pak. Pak, jadi

Melihat penyebab lokasi kebakaran dalam pemetaan gambut yang kami lakukan itu melihat kriteria dia terbakar di 2015 karena memang BRG dibentuk oleh Presiden untuk memulihkan kebakaran 2015 setelah, ada 800 ribu hektar Pak hampir 900 ribu hektar dari 2,6 juta yang terbakar di 2015, 35%, sepertiganya ada di gambut 900 ribu hektar. Setelah itu kita mencoba memprediksi daerah gambut yang sudah terbuka bisa dilihat dari citra satelit, tidak ada kacup tutup pepohonannya lagi dan yang banyak kanal. Dan bukan tanaman lah. Kalau tanaman kan dijaga Pak ya. Jadi berupa semak belukar, sebab terbuka. Dan kanal banyak, kanal banyaknya itu tentu karena pengeringan. Itu tanda-tanda akan mudah di tahun-tahun berikutnya.

Jadi dari pemilihan jumlah 2 juta sekian hektar, 2,6 in, itu menggunakan kriteria tersebut. Jadi kriteria yang kita lakukan itu sudah kurang lebih memperkirakan areal yang akan terbakar, pernah terbakar, atau terbakar berulang dan umumnya tidak berupa tanaman. Ini tentu untuk mengantisipasi agar dijaga tata airnya diperbaiki, semak belukar dan ternyata dia bukan gambut dalam, tentu kita bisa bantu masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. apabila itu perikanan, pertanian, atau tumpang sari atau *agroforestry* dengan tanaman hutan.

Semua tujuannya agar bisa kembali terjaga. Tapi memang kalau ditanya berapa anggaran yang dibutuhkan dalam lima tahun? kawan-kawan Bank Dunia dan CIFOR pernah membantu kami melakukan perhitungan termasuk membantu LHK. Kalau saya ambil kisarannya rendah dan atas ini kan kajian mereka berdasarkan beberapa asumsi. Kisarannya untuk 5 tahun kalau dirupiahkan itu 50 sampai 75 triliun Pak, berarti setahunnya antara 10 sampai 15 triliun per tahun. Ini kita baru berbicara 2 juta hektar. Kalau kita berbicara 14,9 juta hektar tidak berarti di kali lipat karena dari 14,9 ini masih ada 7 juta yang masih bagus. Ini hanya perlu menjaga saja yang paling mahal kan ketika harus kita memulihkan, merestorasi.

Seperti kata Pak Dirjen untuk menghitung neraca air, untuk melakukan pemulihan hidrologis dengan sempurna itu harus lihat peta dari seluruh ke KHG

nya Pak 50 ribu hektar dengan topografi sehingga kita tahu mana daerah puncak kubah yang untuk menyimpan air, kanal yang ada apakah di potong kontur, dan kanannya seberapa banyak jaringannya sehingga kalau mau ditutup harus berapa sekat yang di bangun? Saya ambil contoh Pak, saya waktu awal datang di BRG dengan pengetahuan terbatas, para pakar dari UGM. ITB Bandung. ITB informasi ke saya kalau mau tutup sekat kanal itu 1 kanal bisa beberapa sekat kan Pak. satu tidak cukup.

Cara hitungnya bagaimana? cara hitungnya setiap ada perbedaan 50 cm ketinggian itu harus ada sekat yang kedua seterusnya-seterusnya. Kita bisa mengukur ketinggian dari asalnya kanal dan ujungnya kanal. Misalnya Pak kanalnya panjangnya 5kilometer perbedaan tinggi nya misalnya 10 meter berarti kan setiap, saya asumsikan oh 5 kilometer dibagi 10 dapat 500 meter. Bangun saja sekat kanalnya setiap setengah kilo, setengah kilo. Saya diberitahu oleh para profesor, tidak bisa. Loh kenapa Pak? Karena ketinggian beda 10 meter ini tidak linier dia Pak. Kalau di alam kan dia begitu kecil ya. Ini pasti salah kalau bangunnya diasumsikan dibagi 10. Jadi bagaimana? Harus diukur kontur 5 kilometernya dan diukur kelerengannya.

Jadi semakin dia lereng semakin mantap semakin landai bisa semakin jauh. Saya kurang percaya, terus kita buat pemetaan dengan LiDAR, dengan laser Pak, mahal sekali dibayari bantuan luar negeri Bu, bukan APBN. Betul ternyata. Jadi ternyata yang kanalnya 5 kilo itu, dia lebih terjal ketika di awal kenal, ketika sudah mendekati hilir dia lebih landai. Nah jadi kerapatannya jadi berbeda. Nah kalau kita membangun dengan tanpa paling peta yang akurat tentu tidak akan maksimal. Akhirnya kanalnya jebol karena air terlalu kuat. Nah ini membutuhkan pemetaan yang 50 ribu dengan skala yang bahkan kalau untuk daerah yang harus kita perbaiki tata airnya karena kita ingin tahu perbedaan 150 Cm, itu skalanya harus 1: 2.500. Ya jadi akan sangat mahal begitu ya.

Nah tetapi ini ada BIG, izin Pak Dirjen. Dengan metode yang baru untuk mengirit biaya itu perhitungan terakhir peta, kami akan mengatakan 84 KHG tahun depan. Diperkirakan biayanya 16 miliar jadi berarti kurang lebih 1 KHG 200 juta. Nah tentu titik samplingnya berkurang. Jadi kalau tadi Pak Dirjen itu memang mahal sekali Pak, karena harus banyak buat titik sampling untuk orang mengebor. Semakin banyak titik sampling makna semakin akurat tapi juga akan semakin mahal.

Dari kajian BIG (Badan Informasi Geo spasial) dengan memadukan citra satelit tingkat tinggi, resolusi tinggi dengan juga *digital elevation model* dan itu dua satelit berputar di bumi dan meletakkan. Karena 2 satelit topografinya kelihatan, walaupun tidak bor tapi bor jumlahnya itu lebih sedikit sepertiga atau bahkan seperempat dari konvensional sehingga bisa mengirit pembiayaan. Tetapi pernyataan seperti ini hanya untuk kata tata air Pak bukan itu fungsi lindung ataupun fungsi budidaya diperintahkan oleh Permen 14 nya Bu Menteri, begitu. Jadi kita akan melakukan penataan untuk menghitung neraca air demi memastikan di mana letak sekat kanal yang paling akurat untuk menjaga kebasahan gambut.

Tapi, Bapak Ketua, Bapak/Ibu, tidak mudah ketika kanal yang besar sudah menjadi sarana transportasi masyarakat ataupun perusahaan untuk disekat pasti terganggu transportasi masyarakatnya. Nah ini harus menjadi terobosan lain. Beberapa peneliti, pakar mengatakan pada kami, kalau itu susah ya sudahlah kanal yang besar ini, kita tidak bisa sekat karena kan kondisi sosial. Disekatnya kanal-kanal kecil yang keluar dari dia, jadi kanal besarnya hanya cukup 1 sekat di paling ujungnya di muara nya untuk mengatur tata air. Harus diberikan lokasi orang bisa, semacam dermaga untuk mengangkut transportasinya. Nah, kanal-kanal kecil atau kanal sekunder yang kanal besar ini yang harus disekat dengan intensif.

Jadi semuanya bisa dihitung dengan rasa air tadi. Ibu/Bapak betul, berapa air yang masuk selama musim hujan mulai dari Januari, Februari, Maret, sampai bulan Juli. Berapa air yang harus kita tampung, kita simpan, kalau ada 4 bulan musim kemarau berarti airnya harus sekian juta ton untuk satu KHG ini. Kalau airnya, kalau kemaraunya 5 bulan lebih banyak lagi. Nah itu bisa dihitung berapa yang harus kita simpan dengan infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal atau penimbunan kanal atau kalau diperlukan memang dibuat embung.

Ibu Endang, Litbang PUPR, pernah bekerja sama dengan kami di Tangerang Selatan membuat kajian *long storage* Bu, jadi kanal panjang yang dijadikan tempat penampungan air. Ini juga masih menunggu hasil kajiannya, tentu seberapa efektif dan seberapa mahal. Jadi kalau nanti kita hitung jumlah air hujan yang turun itu kurang, karena ini kemarau panjang, mau tidak mau kita harus membuat tandon air buatan, tidak cukup hanya dengan puncak kubah. Ini seluas sedang kita siapkan, harapannya ada beberapa model yang bisa kita lakukan.1 sudah dikerjakan Komisi IV, di Kampar di Rimbo Panjang. Hasil kunjungan Komisi IV dipimpin Pak Budisatrio. Juga dari PU, kemarin rapat dipimpin Pak Menteri langsung.

Kita meminta lokasi yang paling sering terbakar di Riau, dijadikan juga *role model* contoh, jadi mungkin Riau akan ada dua, Sumsel kita juga usulkan ada dua, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Jadi mungkin kalau memungkinkan dengan anggaran yang ada dikoyok terus sama PUPR terus sama Kemenpan, Kementerian Desa, Kemendagri, KLHK dan BRG tentunya itu harapannya bisa enam, tujuh, atau delapan KHG model kita lakukan pembasahan secara bersama-sama.

Dan tentunya kita, saya, setuju dari Pak Asep mengatakan Pak Sunarna bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan investasi, kita sedang mencoba beberapa terobosan ada di Bandung. Litbang Pertanian, Bu, bibitnya begitu, dan pemeliharaan agronominya. Kita dibantu juga para pakar dari berbagai universitas di Jawa maupun di Kalimantan dan Sumatera, untuk (suara tidak jelas) oke, kalau se lahan sekian, per hektar investasinya sekian, kalau tumbuhan yang tumbuh dengan baik sesuai perencanaan untuk gambut yang 2 meter itu akan mendapatkan berapa ton produk harganya berapa? sehingga berapa tahun dia *turn over*, bisa balik modal.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Di Kalimantan Barat sudah diaplikasikan Pak? Karena di sana kekurangan pangan jadi saya dengan Pak..

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bu Endang tolong, harus melalui meja pimpinan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik Pak Ketua, jadi ada yang terselip ada yang terselip. Yaitu saya mengemukakan bahwa Kalimantan Barat ini kekurangan pangan. Nah biasanya diimpor dari pulau lain. Alangkah baiknya Pak, diaplikasikan di sana karena kebetulan kami dengan Pak Kris, baru saja mengunjungi Kalimantan Barat dan masyarakatnya sangat miskin, tidak ada inovasi teknologi yang bisa diaplikasikan.

Nah ini jadi PR kita bersama, padahal Pak Kepala Badan tadi sudah menjelaskan beberapa inovasi-inovasi teknologi yang sudah dihasilkan. Nah mohon diprioritaskan. Dan yang kedua titipan dari konstituen saya untuk Pak Dirjen, belum diantisipasi, Pak. Bahwa sampai hari ini, longsor yang ada di Paledang, Bogor belum ada yang menindaklanjuti, Pak. Kepala Balainya, katanya, tunggu instruksi dari pusat.

Terima kasih.

Izin Pak Ketua. Mohon maaf.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Kami catat Bu, untuk Kalbar, pangan. Ini Bapak Kepala Dinasnya ada di sini. Sudah ada percobaan beberapa komoditi juga sesuai usulan masyarakat dan juga usulan dari Pak Gubernur ini kami lihat lagi apa tadi sudah diperkuat.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, izin Ketua.

Jadi begini Pak Kepala BRG, kita ini selalu bikin Demplot. Saya sejak lahir 38 tahun yang lalu, kerja, Demplot nya. Kita sudah lihat, di Kalimantan Selatan ada keberhasilan. Berani enggak kita, bukan Demplot lagi, diproyekan..

(rekaman terpotong) kegiatan di sana, dinas yang melaksanakan. Misalnya 1 hamparan 20 hektar atau 100 hektar gitu. Jadi konkrit dan anggarannya bisa diajukan. Karena demplot terus, kalau demplot lebih bagus ya. Tapi tindak lanjutnya kok belum ada. Saya sudah mengalami lah, demplot saya dulu bagus, tapi enggak pernah dilanjutkan gitu ya. Ini melalui Ketua, saya kira demplot yang sudah oke kita tindaklanjuti jadi tahun depan sudah bisa kita lihat hamparannya yang hasilnya bagus.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ini pengalaman dulu bohongi anggota dewan.

Kepala Badan.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Terima kasih.

Betul sekali Pak Darori yang terhormat. Kami sangat setuju ada beberapa lokasi yang kami persiapkan Pak. Ada di siapkan 20 hektar, pas 20 hektar di Siak. Ini memang objek (suara tidak jelas) tapi jatuhnya di gambut. Ada yang dalam ada yang tipis. Jadi ini kita jadikan percontohan. Kebetulan yang 20 hektar di Siak ini disetujui, dibiayai dari anggaran BNPB Pak. Jadi kami bersyukur tidak usah keluar dari BRG, dari BNPB. Ada juga yang sedang disiapkan, yang lebih luas Pak. Termasuk ada 5 desa yang sudah kita kaji dengan kajian tim ekonomi *Rural Development Zone* jadi RDZ jadi ada 5 desa di beberapa provinsi.

Kita siapkan dengan perhitungan total 1 desa ini kawasan gambutnya yang ingin dimanfaatkan yang sesuai dengan kaidah ekosistem itu membutuhkan investasi berapa, termasuk kita harus mengetahui infrastruktur untuk akses keluar pemasarannya. Terima kasih Pak, nanti kami sampaikan secara tertulis lengkap ke Komisi IV untuk minta dukungan Kementerian ataupun lembaga lain. Saya kira ini.

Terima kasih.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Izin Pak Ketua boleh?

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Tadi belum dijawab oleh Kepala BRG. Pertanyaan saya kaitan anggaran yang terserap ini kan baru terealisasi kurang lebih 56 ya atau 60-an. Berarti kan dengan efektivitas waktu yang ada ini sudah akhir tahun, seberapa optimis? Apa memang akan di Silpa kan sementara program-program dibawa saja sudah pada menginginkan gitu ya terhadap program yang akan di sampaikan oleh BRG.

Terus mungkin dari Dapil nih siapa yang mengurusinya Dirjen? kaitan dengan pencemaran Sungai Ciujung dari limbah industri, mohon menjadi perhatian dari pihak Dirjen terkait. Boleh disurvei Pak kalau setiap waktu.

Terima kasih.

Ciujung Serang, Provinsi Banten.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Silakan di jawab Pak.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Bu Nur'aeni per 1 Desember serapan 63,5%. Kalau dihitung dengan *outstanding* kontrak yang belum dibayarkan karena memang tahapnya belum sampai (suara tidak jelas). Susunan kami itu 76% per 1 Desember. Hingga Desember akhir diperkirakan 92%, optimis 92 Bu. Tidak berani 98. Sementara Bu Menteri minta kita 98 kita sudah tidak, awal mengatakan 92. Nah hanya bisa 92.

Terima kasih Pak Dirjen.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih Bu Nur.

Jadi siap Bu, kami sudah catat dan *insyallah* nanti kita akan sepakati kapan ke lapangan. Bu Endang juga sama yang nanti kan ini Dirjen PSKL Bu, nanti kami koordinasikan.

Terima kasih Bu.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih kepada Para Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala BRG yang telah menyampaikan jawabannya,

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua?

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tunggu sebentar. Bapak baru datang, tunggu sebentar. Bapak/Ibu di sini juga datang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari 7 provinsi. Ada yang 5 Kadisnya, ada yang 2 Sekretaris Dinas. Adakah yang mau disampaikan? Jadi Bapak-Bapak, Ibu diundang ke sini jangan hanya untuk duduk, diam, tidak memberikan masukan kepada kami. Karena yang tahu permasalahan di wilayah secara detil adalah Bapak dan Ibu yang dari provinsi Jadi kalau selama ini rapat diundang hanya duduk, diam, mendengarkan. Kalau sekarang kita berikan waktu untuk bicara. Tapi tolong jangan lebih dari 5 menit. Silakan

KEPALA DINAS LHK PROVINSI SUMSEL (EDWARD CHANDRA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**Pimpinan dan anggota Komisi IV yang kami hormati.
Bapak-Bapak Dirjen, Bapak Kepala BRG**

Saya Edward Chandra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin singkat saja Pak, di Sumsel ada 7 Kabupaten prioritas untuk restorasi gambut tetapi di antaranya pengalaman berapa tahun terjadi karhutla yaitu ada 1 Kabupaten, Kabupaten Ogan Ilir namanya, OI. Yang terdekat dengan Palembang, terbakar, asapnya langsung ke Palembang. Persoalannya di sana kabupaten ada lahan gambut tapi belum ditetapkan sebagai KHG sehingga intervensi baik itu dengan TP itu tidak bisa langsung ya lokasi.

Kejadian yang tahun ini ada satu lokasi, perlu air untuk kita bangun sumur bor, tidak bisa kita intervensi karena tidak masuk ke KHG tadi. Sehingga pada kesempatan ini kami mengusulkan untuk dipertimbangkan Kabupaten OI untuk masuk dalam KHG, ditetapkan menjadi salah satu KHG. Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih, selanjutnya silakan.

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI (BESARI):

Baik terima kasih Pimpinan, mohon izin

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Saya Besari, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Mohon izin menyampaikan terkait kebakaran hutan dan lahan dan permasalahan lahan gambut dan kawasan hutan secara umum. Bahwa kalau kita bicara masalah kebakaran itu tidak bisa kita melihat ini HPL, ini kawasan hutan, ini perkebunan, atau ini izin HTI. Sudah disampaikan sama Bapak Dirjen dan Bapak Kepala BRG bicaranya adalah KHG Satuan Hidrologis Gambut. apa yang sudah dilakukan BRG, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian LHK untuk mengintervensi di areal-areal konsesi agar melakukan *water management* ataupun yang dilakukan BRG dengan melakukan pembuatan sekat kanal dan sumur bor.

Itu tidak akan berhasil ketika bergandengan dengan sebelahnya perkebunan Bapak. Karena pengalaman kami, kami ada namanya Tahura Orang Kayo Hitam. Itu sekat kanal sudah kita bangun di dalam Tahura, sekat

kanal sudah kita bangun. Di perbatasan dengan kawasan hutan dengan perkebunan juga kita bangun. Tapi ketika terjadi kebakaran besar selesai juga yang sudah diintervensi Pak. Karena di sebelahnya kanalnya besar.

Terus tadi disampaikan Pak Karliansyah, Bapak Dirjen bahwa di kehutanan itu *spillway* nya 40 senti Pak, 0,4 sentimeter. Sementara di perkebunan tidak itu Pak, di perkebunan yang saya dengar masih 70 senti Pak. jadi ketika bergandengan apa yang dilakukan BRG itu kesedot ke perkebunan juga Pak. Itu 1 Pak. Jadi perlu kesamaan gitu lho Pak supaya apa yang dibangun ini tidak percuma gitu Bapak. Jadi kesatuan harus disatukan mau perkebunan, mau masyarakat mau kehutanan harus disatukan berapa sih sebenarnya yang *spillway* nya itu.

Yang berikutnya terkait lahan gambut. Tadi ada Pak Bambang Pak Dirjen PSKL. Tadi saya sangat mendukung sekali Pak terhadap areal-areal gambut. Ini kan ada wacana Pak. Kemarin Pak Pimpinan sudah ke Jambi, ada beberapa HPH yang langganan terbakar itu kemungkinan akan dikenakan sanksi dan akan dicabut izinnya. Nah permasalahannya sekarang ketika dicabut izinnya. Seperti disampaikan Dirjen ya, mantan. Pak Darori ini Jenderal saya Pak.

Ketika dicabut ini dikemanakan Pak? Kalau itu dijadikan produksi, jadikan kawasan lindung, itu tanggung jawabnya kembali ke daerah, kembali ke provinsi. Nah ini yang repot Pak. Kalau sudah ke provinsi *open* akses seperti apa? Dikasih perizinan perhutanan sosial, tadi sama-sama sudah kita dengar banyak perizinan sosial itu sebatas izin saja Pak. Setelah diberi izin mereka tidak tahu mau dibikin apa. Pendampingan juga kurang. Karena di Jambi itu perizinan itu sampai 300an lebih. Yang bikin memenuhi kewajiban kan harus bikin RKT. Yang bikin RKT itu 95% itu tidak ada yang bikin Pak. Jadi hanya sebatas izin. Kekhawatiran Pak Pimpinan akan dijualbelikan, itu sudah terjadi Bapak. Jadi memang harus ke depannya lebih leluasa lagi.

Yang ketiga yang terakhir adalah yang terkait apa-apa yang ditanam itu Bapak. Kekhawatiran saya di areal gambut itu kemarin kita sudah tanam Jeluntung Pak. Tapi sekarang ternyata jual jeluntung tidak ada harga Pak, *ndak* ada yang beli. Jadi agak repot kita Pak. Jadi memang setuju saya Pak tadi ada beberapa nanas. Di Jambi juga ada perkebunan nanas di areal gambut, *alhamdulillah* tidak pernah terbakar Pak. Itu murni di APL.

Tapi kalau kekhawatiran saya ketika besar, di *jor-jor* an besar. Kalau di Lampung mungkin masih ada pabrik Pak, kalau di Jambi tidak ada pabrik. Jari ketika panen seperti apa yang disampaikan Bapak anggota dewan yang terhormat tadi akan jadi sampah Pak. Nanas itu enggak ada yang beli Pak. Mungkin itu Pak, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Walaikumsalam.

Selanjutnya Pak.

KEPALA DINAS PR, KP, DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR:

Terima kasih.

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.
Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*

Terima kasih.

Pertama-tama mungkin ada 2 hal yang akan kami sampaikan. Kami dari Kalimantan Barat Pak, mohon maaf. Dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang mungkin umur institusi kami tinggal 1 bulan lagi Pak karena akan pecah 2 institusi. 1 menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 1 lagi yang LH nya akan digabung seperti di Kementerian. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baik, Bapak/Ibu yang kami hormati.

Pertama mungkin berkenaan dengan kegiatan yang kami lakukan ada R1 R2 dan R3 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban BRG RI dan tentunya ini menjadi persoalan kami yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kami bekerja sama dengan BRG dari tahun 2017 sampai 2019 ini adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi terhadap BRG yaitu di areal X terbakar di 2015. Jadi kegiatan kami ini di area X terbakar di 2015. Sedangkan ada area terbakar di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Yang terbakar di 2019 ada tercapai ada areal seluas 125 ribu hektar. Mungkin sebagian kecilnya ada di areal gambut. Nah permintaan masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten, apakah bisa dilakukan restorasi gambut ini di areal di luar daripada target yang dibebankan kepada BRG? sehingga mungkin itu bisa dilaksanakan juga. Kemudian kedua, tadi Pak Darori juga sudah sampaikan juga yang terhormat, bahwa di areal kami juga ini tidak hanya di areal kawasan hutan yang kami lakukan perbaikan berkenaan dengan BRG tapi daerah masyarakat.

Kemudian yang ketiga tentu dengan adanya kegiatan ini bahwa pertama, R3 revitalisasi dan ini ternyata baik dilakukan di kami. Contohnya ada salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sambas. Ini ada revitalisasi yang kami bantu 2 hektar untuk tanaman talas. Ternyata dari 2 hektar ini sekarang sudah mencapai 7 hektar Pak. Oleh masyarakat menanam talas di areal gambut tanpa dilakukan dengan pembakaran. Nah mungkin ini bisa ditularkan di kabupaten lain sehingga tidak hanya kepada masyarakat-masyarakat yang menjadi tadi, demplot di areal-areal ini.

Kemudian yang menjadi persoalan pada saat menanam harga tinggi Pak, tapi pada saat panen, nah ini jadi persoalan. Namun *alhamdulillah* Kabupaten Sambas ini dekat dengan perbatasan sehingga masih bisa dibantu untuk di pasarkan di Malaysia. Mungkin menjadi persoalan yang ada di lokasi kami.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.*

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALTENG:

Izin Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera.*

Kami dari tim restorasi gambut Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti tadi disampaikan bahwa program kegiatan yang dilakukan melalui tugas pembantuan ada R1, R2, dan R3. Dan khusus untuk kegiatan R1 yaitu kegiatan pembuatan sumur bor dan sekat kanal karena Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 sampai 2019 mendapatkan dana yang cukup besar dibandingkan 7 provinsi yang lainnya. Ini berkaitan dengan pembangunan sumur bor yang telah dilaksanakan sejak 2017 Kalimantan Tengah. Jadi kalau jadi total ada sekitar 10.905 sumur bor Pimpinan, yang sudah dibangun.

Dan kalau kita lihat yang mengoperasikan di lapangan adalah MPA namanya Masyarakat Peduli Api. Tetapi persoalan yang ada di lapangan bahwa MPA ini kan tidak diberi insentif jadi hanya berupa upah. Kalau ada itu pun hanya di pada saat di tahun 2018 yang ada dengan 1 hari sekitar 125 ribu ditambah dengan transport, seperti itu.

Jadi usulan kami bagaimana kalau MPA ini diberi insentif gitu. Karena mereka ini di samping bekerja mereka harus meninggalkan pekerjaannya pada saat musim musim kering ataupun musim kemarau. Dan mereka ini lah ujung tombaknya. Jadi kalau dana yang diberikan sangatlah minim dan kita kasihan. Mereka meninggalkan keluarga, memburu api gitu dengan resiko yang cukup tinggi. Begitu juga dengan kesehatannya, seperti itu. Jadi harapan kami mudah-mudahan di tahun 2020, walaupun dari BRG melalui tugas pembantuan, kita juga ada pemeliharaan, seperti itu.

Mudah-mudahan nanti mereka pada saat bulan-bulan kering sudah diberi insentif sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bisa konsen untuk melaksanakan kegiatan pembasahan terhadap pembangunan infrastruktur

pembasahan gambut yang sudah dibangun itu. Dan untuk kegiatan R3 *alhamdulillah* untuk provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan dengan baik dan kalau kita lihat apa yang didapatkan sebagian sudah berhasil dan sebagian juga yang MPA nya Masyarakat Peduli Api nya sudah bisa membantu untuk operasional kegiatan mereka dalam pembasahan infrastruktur pembasahan gambut. Kami pikir itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya ada lagi?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua untuk mengingat menyambung yang terakhir Pak Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sebentar Kanjeng, ada lagi?

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA:

Terima kasih.

Pak Ketua Komisi IV beserta Bapak/Ibu anggota dewan.

Pak Dirjen yang kami hormati.

Pak Kepala BRG yang kami hormati.

Bapak/Ibu sekalian.

Kami hanya melaporkan secara sekilas saja karena tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kepala BRG bahwa presentasi kemajuan kami di Papua sudah 92% karena kebetulan yang kami lakukan hanya R3, revitalisasi. Jadi agak beda dengan teman-teman di 6 provinsi. Kalau yang lainnya kan R1, R2, dan R3. Kami cuma revitalisasi *tok* dan itu hanya untuk bagaimana membantu masyarakat di dalam penyediaan pangan dan kami hanya melakukan untuk Kabupaten Mappi dan Merauke, ini di wilayah Selatan.

Dan ini sejak 2018 itu kami baru di Kabupaten Mappi itu di 7 kampung untuk KHG yang telah ditetapkan oleh BRG dan 7 kampung rata-rata, 1 kampung luasnya sekitar kurang lebih 5 hektar Pak. Jadi kita sudah di tahun lalu 35 hektar itu kegiatannya adalah penanaman sagu Pak. Jadi kita terus untuk menguatkan masyarakat di dalam menyiapkan ketahanan pangan. Jadi orang Papua itu makannya sagu sebetulnya, kita punya ketahanan pangan untuk masa depan itu sagu.

Lalu di Merauke, tahun ini kita juga sudah masuk lagi tapi kita tambahkan lagi dengan padi Pak. Karena kebetulan di KHG yang terpilih itu bekas transmigrasi jadi ada lahan untuk padi. Itu ada 80 hektar di Kampung Sumber Rezeki dan Sumber Mulia itu hampir kebanyakan saudara-saudara kami dari Jawa, Jawa Merauke. Kemudian di masyarakat lokal itu asli Marind itu ada 10 hektar untuk tanaman sagu dan itu kami sudah selesaikan sampai dengan laporan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BRG. Masih ada beberapa yang belum kami selesaikan, itu mungkin untuk apa penyulaman karena di tanaman sagu ada yang mati karena di Merauke masih panas Pak.

Mungkin yang ingin kami tambahkan mohon izin Pak Kepala BRG, kami ingin mendapatkan, mengusulkan kalau bisa kami diberikan biaya sedikit untuk pemeliharaan paling tidak ada (suara tidak jelas) satunya. Sebab kalau kita kan tidak ada pemeliharaan juga repot. Dan ini sekarang kita juga bagaimana membuat masyarakat mau kembali untuk melakukan penyulaman di tanaman yang sementara sudah mati. Dan ini mereka tanya, ada biayanya enggak? kami juga harus menjawab ya mungkin untuk sementara tidak ada tapi kemungkinan tahun depan kami akan diberikan sedikit tambahan untuk pemeliharaan. Nah rata-rata 1 kampung itu 200 juta Pak, jadi anggaran 5 miliar lebih. Jadi untuk Merauke dan Mappi sama, satu kampung 200 juta. Nah realisasi fisik dan keuangan nya sudah capaiannya kurang lebih 92%.

Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak, tunggu dulu tadi yang belum ngomong Pak Hermanto. Silakan Pak Doktor Hermanto, Profesor Doktor ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua, atas jasa baiknya. Santai saja Pak Darori. Baik Pak Ketua, saya terima kasih sekali.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ketua, anggota, dan Pemerintah dalam hal ini ada BRG, ada Kementerian Kehutanan.

Saya ingin mendalami terkait dengan soal data. Di tangan saya ini ada dua data. Data kebakaran hutan. Ada yang sumbernya ini dari Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan satu lagi data dari Dishut Provinsi Sumatera Selatan. Saya mencoba untuk mengkonfirmasi dua data ini dan mencoba untuk memahami kedua data ini yaitu data kebakaran. Luas data kebakaran menurut Dishut Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ini. Kita pakai 2019.

Saat Komisi IV melakukan Kunspek yang terakhir bulan pertengahan November. Itu menunjukkan luas lahan kebakaran itu adalah 361.857 hektar.

Ini dari Dishut Provinsi Sumatera Selatan dan juga dipakai oleh Korem sebagai data laporan Korem. Kemudian saya mencoba mencermati data dari Direktorat PKHL ini. Ini di Sumatera Selatan ini ya, khusus Sumatera Selatan. Kebakaran itu luas lahannya adalah hanya 52.716 hektar.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Yang 52 ribu dari data mana Pak? Dari LHK atau dari mana?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini datanya dari PHKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi bedanya hampir?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Dari 350 ribu ke 50 ribuan. Berarti bedanya itu adalah sekitar 200 ya? 300. Luas lahan kebakarannya saya enggak tahu sumbernya dari mana. Ini ada tertulis di sini. Saya kebetulan baca di meja ini. Jadi saya ingin mengkonfirmasi saat kita kunspek baik yang dijelaskan oleh Pemrov maupun kita langsung ketemu di lapangan itu datanya sama yang dipakai, yakni luas kebakaran adalah 350an ribu tadi. Dan di sini melihat 52.716.

Ini bagaimana bisa terjadi perbedaan data yang sangat luar biasa? Artinya ini apa? Ini kan bisa banyak hal yang terjadi dan dia bisa berdampak berbagai hal terutama dalam hal strategi kita mengatasi kebakaran itu. Dan terutama juga terkait dengan program apa yang harus kita lakukan? dan terakhir adalah terdampak pada soal besaran anggaran yang harus dialokasikan.

Nah ini, kita Komisi IV ini perlu data yang sama begitu lho. Data yang sama ini adalah untuk kita menjaga komitmen kita. Pertama itu adalah kita ingin menunjukkan bahwa pemerintahan ada sinergi, ada koordinasi, ada konsolidasi antara pusat dan daerah. Tetapi kenyataan tidak begini gitu Pak. Nah ini saya ingin mempermasalahkan ini karena ini adalah sangat penting buat kita. Ini satu poin.

Poin yang lain, saya juga membaca data dari Sumatera Selatan ini ada peningkatan luas lahan kebakaran, luas lahan yang pelipatan kenaikannya itu adalah hampir mendekati 9 kali lipat dari tahun 2018. Dan 2018 itu sekitar 41 ribu dan 2019 itu adalah 351 tadi. Nah ini saya melihat ada kenaikan jumlah lahan yang terbakar itu tidak mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun 2015, memang kebakaran 2019 ini berada di pertengahannya, 50% nya. Tetapi kita lihat tren dari kebakaran selama 4 tahun ini, 2019 ini mengalami kenaikan tajam. Pertanyaan saya adalah apa peran BRG dalam hal mengatasi ini? dan apa peran Kementerian mengatasi ini?

Kenapa begitu sangat masif dan meluas? Ini saya baru membahas Sumatera Selatan. Saya belum mencoba untuk membandingkan dengan daerah-daerah lain karena ini saya diberi oleh Ketua waktunya cuman 3 menit, jadi saya perlu membatasi diri. Tapi juga begini Pak Ketua, sebenarnya 3 menit ini terlalu pendek buat kita bicara.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ya kalau untuk Pak Hermanto saya tambah 2 menit tapi nanti pembahasan beda data tadi, kita pertanyakan pada waktu Raker dengan Menteri LHK.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Oke siap. Jadi terima kasih Pak Ketua atas kebaikannya.

Jadi saya, kami, Komisi IV ini ingin satu data, itu yang penting dulu, ingin satu data. Kemudian saya juga membaca laporan dari BRG ini juga sudah melibatkan berbagai level masyarakat. Mulai dari gurunya, mulai dari tokoh masyarakatnya, dai nya, dan segala macamnya. Nah apakah dengan pelibatan masyarakat itu dengan kalau kita cari relasinya dengan kenaikan kebakaran sekarang ini, apakah memiliki relasi yang kuat dengan melibatkan masyarakat terhadap penurunan jumlah lahan kebakaran? Tapi faktanya kan tidak, gitu.

Jadi saya ingin pertanyakan juga di sini, seberapa efektifkan pelibatan masyarakat itu dalam hal memperkecil luas lahan yang terbakar. Ini sangat penting karena ini juga nanti semakin besar kita menambah anggaran untuk keperluan-keperluan tidak efektif, buat apa kita meminta anggaran di sini? Nah ini pun juga kita perlu ada transparansi terkait dengan anggaran BRG ini. saya mendapatkan informasi bahwa ada juga anggaran dari dari luar. Nah seperti apa pengelolaan anggaran dari luar ini untuk kepentingan pengelolaan mengatasi lahan hutan yang terbakar ini. Demikian Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Hermanto.

Kanjeng silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya tadi disampaikan oleh teman-teman daerah itu yang merasakan langsung Pak. Memang kalau orang enggak pernah menghadapi di lapangan, ada duit, ada alat, ada orang, kok kebakar? kalau sudah merasakan di Jambi, di Riau, Sumut akan merasakan. Ada duitnya, ada orangnya, kok kebakar? ternyata tidak semudah itu lah mengatasi. Karena kebakaran itu kita analisa

ada lima penyebabnya dari regulasinya, dari manusianya, alatnya nya, kondisi lahannya, dan iklim ini. Ini yang menjadi.

Nah tadi ada satu yang terakhir Pak Ketua, ini ada hal yang berubah. Dulu kami sampaikan bahwa untuk Masyarakat Peduli Api itu lebih baik kita anggarkan selama musim kemarau untuk menjaga daripada mendatangkan polisi tentara untuk memadamkan. Tidak mungkin kita bisa madami kalau sudah terbakar

Jadi saya sarankan kembalikan lagi lah Pak. Mungkin itu Dirjennya enggak ikut soalnya ya. Jadi tolong sampaikan Dirjennya urusan kebakaran hutan ini Pak Profesor, itu Dirjen kebakaran enggak ikut ini. Ini Dirjennya soal gambut ini. Tolong kembalikan lagi, kita lebih baik mencegah. Masyarakat Peduli Api sekitar kawasan hutan, sekitar lahan yang rawan, kita gaji. Dulu di gaji. Kita kasih seragam, baju kaos Peduli Api. Orang-orang yang terhormat di situ dan ternyata aman. Mohon maaf Pak Ketua, saya itu dulu 6 tahun Dirjennya enggak pernah kebakaran tuh. Kalau sekarang sampai tentara polisi. Itu karena kita gunakan rakyat setempat.

Jadi daripada kita ramai-ramai sampai Presiden turun, itu karena enggak pas gitu. Saya kira kembalikan lagi lah. Ini Pak Hartono masih ada, ini Pak Didi, masih orang-orang lama ya. Kalau rakyatnya digaji di akan akan tanggung jawab. Waduh kalau kebakaran di daerah saya gimana nanti? Dia akan *woro-woro*. Misalkan khotbah Jumat, di Gereja, juga akan ngomong. Oh iya kemarau jangan, ini kemarau. Tapi kalau gereja, masjid, enggak didekati, akan habis itu.

Saya kira itu Pak Ketua, nanti ke depan saya kira kalau RDP dengan Menteri tolong di prioritaskan lah ini, Masyarakat Peduli Api dan Manggala Agni. Manggala Agni ini kami punya utang Pak Ketua. Sudah banyak yang pensiun belum ada yang diangkat jadi pegawai negeri itu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Dirjen.

Saya masih menganggap beliau sebagai Dirjen. Jadi Pak Dirjen 2 dan Pak Kepala Badan tadi sudah ada masukan dari provinsi, mohon ditindaklanjuti karena aetahu saya contohnya saya ke Kalteng waktu itu melihat sumur bor, Pak Kepala BRG menjanjikan akan membangun sarang burung walet. Jadi maksud saya kalau memang rakyat ini berikan sarang burung walet dan menjadi MPA dan alangkah lebih baiknya. Jadi tidak perlu dikasih honor tetapi dikasih suatu mainan yang menghasilkan uang, iya kan? iya Pak Kepala Badan ya?

Waktu kita ke Kalimantan Tengah kan dulu kan? sudah dibangun? nah itu kalau bisa diperbanyak jadi MPA ini enggak, mohon maaf ini, enggak ada rintangan tapi kan mereka berusaha dapat membantu menjaga supaya jangan

terbakar tapi juga dapat duit dan punya harga diri tidak menadahkan tangan kalau belum nanti kerja sama dengan Kementerian KKP misalnya di Belgia. Kalau perlu nanti kerja sama dengan Kementerian KKP. Misalnya BRG membangun tambak ikannya, KKP memberikan bantuan bibitnya. Jadi mereka menjaga sambil menghasilkan uang, itu lebih baik, ya Pak Kepala Badan ya?

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Dari dialog dan diskusi saran dan masukan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebelum acara ini kita akhiri akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Tayangkan.

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Kepala Badan Restorasi Gambut terkait realisasi program restorasi gambut, upaya pengendalian kerusakan gambut, serta potensi budidaya tanaman di lahan gambut oleh masyarakat di dalam atau di luar kawasan hutan.

Anggota ada yang mau menambahkan?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua.

Tadi saya sependapat dengan *statement* Pak Ketua. Apakah tidak sebaiknya tadi ditambah dengan perikanan karena ini kan hanya potensi budidaya tanaman.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tambahkan di setelah “tanaman” koma.

Anggota?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Di luar diganti di sekitar kawasan hutan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Di sekitar ya? Bukan di luar. “di sekitar kawasan hutan”.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jakarta termasuk di luar Pak

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Anggota?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi saya mencermati 2 kata di situ yang sebenarnya kalau kita letakkan di situ terjadi antagonistic. Di situ menyebutkan “oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.” Kalau kita sudah menggunakan “di sekitar kawasan hutan”, tidak perlu lagi menggunakan kata “dalam”, “dalam” itu juga adalah sekitar hutan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Karena gini Pak Doktor, kan ada juga masyarakat di dalam kawasan hutan gambut itu yang tinggal. Jadi kalau bicara kalau cuma di kawasan hutan rasanya nanti yang di dalam enggak kebagian juga, ya? di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Gini Bapak, kalau kita ingin menafsirkan di sekitar kawasan hutan itu, itu adalah termasuk pinggiran kota. Perbatasan dengan kawasan hutan itu juga kota dengan hutan, itu juga perbatasan juga itu. Jadi kalau kita menggunakan 2 kata yang antagonistik ini, enggak tepat.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Maksud Pak Doktor apa redaksinya? coba saya mau dengar dulu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya kalau saya ingin hanya cukup menggunakan sekitar kawasan hutan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Berarti kalau orang yang tinggal di dalam hutan? enggak bisa. Sekitar kawasan.

Pemerintah? Setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar Badan Restorasi Gambut melakukan pemetaan karakter dan kedalaman gambut pada masing-masing wilayah di 7 provinsi yang menjadi target restorasi gambut dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut

Anggota? Pemerintah?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Mohon izin Pimpinan.

Ditambahkan KLHK Pimpinan. Karena kita sudah sepakat dengan BRG, BRG mengambil 106 KHG, dari saya 300an. Jadi “meminta agar KLHK dan Badan Restorasi Gambut”

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tambahkan KLHK nya. Itu “melakukan”

Anggota?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua, izin.

Kalau fungsi koordinatifnya itu yang ada di wilayah mana? KLHK atau BRG sendiri? Kalau dari segi peraturan ya, regulasi.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Mohon izin Pimpinan.

Di dalam Perpres juga disebutkan ada kewajiban BRG tapi yang menetapkan Menteri. Yang menetapkan Menteri tapi.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pemerintah setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

3. Komisi IV mendorong agar Badan Restorasi Gambut terus meningkatkan kinerja dalam realisasi program restorasi gambut termasuk program pemberdayaan masyarakat meningkatkan kinerja dalam realisasi program restorasi gambut termasuk program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian asas legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan gambut melalui program perhutanan sosial.

Anggota? Pemerintah?

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Yang memberikan akses perhutanan sosial KLHK Pak. Jadi “Komisi IV DPR RI mendorong agar KLHK dan”

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Diingatkan dan kali itu. Mungkin “kehutanan” nya jangan pakai “dan” lagi, “serta” itu.

Anggota bisa disetujui? Pemerintah?

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan agar Pemerintah melalui melakukan *review* pelaksanaan tugas yang telah dan perlu terus dilanjutkan oleh Badan Restorasi Gambut untuk kemudian dapat melakukan perpanjangan masa tugas Badan Restorasi Gambut melalui mekanisme perubahan Peraturan Presiden 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Anggota?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua?

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kecenderungan luas lahan terbakar kita itu semakin meningkat. Jadi pertanyaan saya itu tadi adalah BRG ini sebenarnya selamanya enggak ada fungsinya. Jadi buat apa kita mempertegas BRG di sini?

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Hermanto? Jadi kalau Bapak BRG tidak ada fungsinya, ya tidak mungkin Pemerintah membuat. BRG itu fungsinya menjaga lahan gambut bukan sebagai pemadam kebakaran. Contohnya yang di Kalimantan Tengah di lahan gambut di bikin sumur bor, ditanami buah naga dan lain-lain. Jadi kalau enggak diperpanjang, ya kemungkinan el nino datang atau 2021 itu akan terjadi

kebakaran yang lebih hebat lagi kalau tidak dijaga gambutnya. Karena gambut ini salah satu juga fungsi yang sangat penting.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya baik Pak Ketua. Kita ingin mempertanyakan selama ini Badan Restorasi Gambut kemana saja gitu lho. Luas kebakaran yang belakangan ini terjadi di lahan gambut, jadi misalnya membuat *channel*, apa gitu, salon apa. Itu seperti apa efektivitasnya gitu lho. Saya khawatir cuma nanti kita mengalokasikan anggaran percuma saja.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua.

Jadi begini restorasi gambut kan tugasnya 2 juta tapi anggarannya hanya untuk 4 ribu hektar. Itu dari situ kita harus sadar bahwa kita itu memberi beban diimbangi dengan anggaran. Satu Pak Ketua. Kalau saya setuju lagi Pak bagaimana ini badan ini kan di bawah Presiden. Anggarannya jangan nempel di kehutanan langsung. Di bawah Menteri Keuangan tersendiri. Gimana kalimatnya itu Pak Ketua?

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Nanti di nomor 5 ada Kanjeng. Jadi sudah jelas ya Pak Hermanto ya? Tugasnya itu lokasinya 2 juta hektar sekian, uangnya cuma sedikit. Dan ini masih nempel anggarannya di KLHK. Pemerintah, nomor 4 setuju? tolong pakai *mic* Pak, karena di rekam Pak.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Setuju Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT/F PDIP (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: DISETUJUI)

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan agar Pemerintah memberikan penguatan dan kemandirian atas kelembagaan Badan Restorasi Gambut dalam rangka meningkatkan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut.

Setuju?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua, tadi kan ada juga anggaran yang Hubungan Luar Negeri, seperti apa?

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Itu beda lagi. Itu hanya bantuan. Pemerintah? Pakai *mic* Pak.

**DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):**

Siap Pimpinan, setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

Demikian rancangan kesimpulan rapat. Bapak/Ibu yang saya hormati, sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini, kami persilahkan salah satu dari Dirjen LHK maupun Kepala Badan Restorasi Gambut menyampaikan kata penutupnya.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Izin Pak Dirjen.

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI yang telah memberikan masukan dengan arahan, dengan bimbingan dan selalu mendukung program kerja penting yang kita kerjakan yang kita lakukan untuk perbaikan ekosistem gambut dan juga masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar ekosistem gambut.

Kami percaya dengan upaya pengalaman yang telah ada selama ini. Pak Hermanto dari 260 Desa Peduli Gambut yang kita bekerja, memang betul masih ada sepertiga yang terbakar Pak. Kita tentu ingin 100% yang telah kita bekerja tidak ada yang terbakar tapi masih ada sepertiga. Tapi kita *committed* untuk terus melakukan perbaikan dari 670 ribu hektar yang telah kita terjang, kawasan masyarakat itu yang terbakar masih ada 4.745 sampai akhir September. Kita ingin betul-betul sampai 0 tapi masih ada.

Dengan dukungan Bapak dan Ibu, rekan kerja, baik dengan pemerintah provinsi yang telah terbangun selama 3 tahun terakhir, bersama KLHK di bawah bimbingan Bu Menteri kami yakin ini nanti bisa terlaksana dengan lebih baik. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Dirjen, Kepala Badan Restorasi Gambut yang paling penting tadi masukan dari teman-teman dinas provinsi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan *insyaallah* kalau tidak ada halangan nanti di bulan Januari kami akan mengundang 7 gubernur untuk RDP di sini. Tujuannya bagaimana mencegah kebakaran hutan terulang lagi, apalagi akan menghadapi el nino pada tahun 2020.

Terima kasih dengan demikian,

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

Sedikit saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya tadi menyinggung ada *gap* data. Saya minta itu supaya di dibereskan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya minta sekretariat buat surat resmi ke LHK.

F-DEMOKRAT (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua saya kita mohon juga diundang PMA yang ada di wilayah Kalimantan juga perlu untuk kita undang. Pemodal asing, PMA. Itu kan banyak ada 53 itu di kawasan sana yang memang wilayah Kalimantan itu kebakaran hutan dikuasai oleh PMA juga. Kalau Sumatera Selatan kemarin data di sampaikan itu milik rakyat, orang per orang.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pak Ketua. Izin.

Saya kira begini, ini sekedar saran buat rekan-rekan semua di Komisi IV terkait yang kita hadapi ini untuk el nino mencegah. Kita butuh mendudukkan para pemangku kepentingan terlebih dahulu. Kalau masalah langsung masalah PMA, atau apa pun tadi yang Ibu sampaikan bahwa kondisinya hari ini tergantung dari kebijakan Pemerintahnya sendiri dan *will* dari provinsi setempat, serius atau tidak menanggulangi hal tersebut.

Sekian, terima kasih Pimpinan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

Saya dukung usulan dari Bu Nur'aeni. Ada nyanyi nya sendiri itu Bu Nur'aeni. Jadi memang kita perlu juga menghadirkan PMA PMA itu Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sudah Pak Hermanto? Saya tidak setuju kalau hanya mengundang PMA. Semua perusahaan penyebab kebakaran hutan kita panggil. Tetapi persoalannya waktu kita sudah mepet. Kita lihat anggota dewan berapa banyak yang hadir, sementara saya jam 9.30 sudah di ruangan ini. Bahkan sudah saya *planning* akan memanggil tidak sekaligus, tetapi bertahap dan itu mungkin saya lakukan pada bulan Januari. Saya tidak mau tahu PMA atau lokal, saya enggak mau tahu ya.

Demikian mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin*, Rapat Dengar Pendapat ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP: PUKUL 15.30 WIB)

Jakarta, 3 Desember 2019

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001